ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

NURFADILLAH
NIM : 105721120220

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURFADILLAH
NIM:105721120220

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar S1 Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedi" (QS. Ibrahim:7).

"Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati semua lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, walaupun tidak akan selalu berjalan lancar, tapi itu semua-lah yang nanti akan bisa kau ceritakan" (Nurfadillah)

.

PERSEMBAHAN

"Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan untuk orang-orang tercinta yaitu kepada Allah swt dengan mengucapkan syukur atas rahmat, karunia dan juga nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menmyelesaikan skripsi ini, kepada baginda nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan Ilmu pengetahuan dan mengajarkan banyak hal tentang nikmat bersyukur dalam menjalankan hidup, kepada orang tua Bapak Sappewali Dan Ibu Dahliah terimakasih atas semua hal-hal yang telah kau habiskan untuk menjaga, menyanyangi, mendidik, dan membimbing serta mendoakan anakmu, terimakasih atas segalah dukungan, kerja keras dan pengorbananmu, maka dari itu gelar sarjana penulis persembahkan untuk kalian, untuk kedua adik saya Dhisyah nur fahrisyah dan muhammad ikhsan annur yang selalu menjadi penyemangat untuk kakaknya semoga cita-cita dan doa dari orang tua kita dimudahkan dan diijabah Aamin, untuk keluarga besar dari ayah dan ibu yang selalu memberikan Support".

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian	: Analisis fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa
Nama Mahasiswa	: Nurfadillah
No. Stambuk/NIM	: 105721120220
Program Studi	: Manajemen
Fakutas	: Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia pengujiskripsi strata satu (S1) pada tanggal 20 April 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 26 April 2024

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Asri Jaya, S.E.,M.M	Nurlina, S.E.,M.M
NIDN:0926088303	NIDN:0930088503

Mengetahui,

Dekan	Ketua Program Studi
Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si	Nasrullah, S.E.,M.M
NBM: 651 507	NBM:1151 132

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung igra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : NURFADILLAH, Nim :105721120220 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0005/SK-Y/61201/091004/2024 M, Tanggal 11 Syawal 1445 H/ 20 April 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Manajemen** pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Syawal 1445 H
20 April 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas ujian : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E,.M.Si (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE,M.Acc (.....)
   (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, M.M (.....)
   2. Asri Jaya, S.E,.M.M (.....)
   3. Dr. Muchriana Muchran, S.E,.M.Si.,Ak,CA (.....)
   4. Nasrullah,S.E,.M.M (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM :651 507

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Telp.(0411)8669712 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurfadillah

Stambuk : 105721120220

Program studi : Manajemen

Judul skripsi : Analisis fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi Yang Saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 April 2024

Yang membuat pernyataan,

NURFADILLAH
NIM :105721120220

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr.H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM :651 507

Ketua Program Studi

Nasrullah, S.E.,M.M
NBM:1151 132

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: NURFADILLAH
NIM	:105721120220
Program Studi	:Manajemen
Fakultas	:Ekonomi Dan Bisnis
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ***(Non-exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Analisis Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Efektif Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,

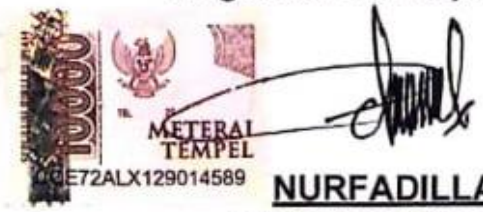

NURFADILLAH

NIM : 105721120220

ABSTRAK

NURFADILLAH. 2024. *Analisis Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Efektif Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.* Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Asri Jaya Dan Nurlina.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif pada kantor daerah kabupaen gowa, data ini diambil di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data pimer dan data sekunder, instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan handphone. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor BPKD Gowa telah melakukan perencanaan yang efektif melalui Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Mereka juga menggunakan sistem komputerisasi untuk mengolah transaksi keuangan, mempermudah pelaporan, dan meningkatkan pengelolaan data keuangan pemerintah. Pengorganisasian yang baik juga terlihat dalam implementasi fungsi manajemen keuangan yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Secara keseluruhan, kantor BPKD Gowa telah berhasil dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan mencapai rasio efektivitas yang baik. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola keuangan pemerintah dengan transparansi, akurasi, dan Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa telah berjalan dengan baik dan efisien dibuktikan dengan hasil data dari tahun 2021 sebesar 101% dan pada tahun 2022 101%. dan di dukung dengan Penghargaan WTP yang diterima setiap tahun juga menjadi bukti keberhasilan dalam pengelolaan keuangan.

***Kata Kunci** : Fungsi Manajemen Keuangan, Pengelolaan Keuangan*

ABSTRACT

NURFADILLAH. 2024*. Analysis of the function of financial management in realizing effective financial governance at the Office of the Regional Financial Management Agency of Gowa Regency. Department of Management Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. supervised by Main supervisor Asri Jaya and Co-supervisor Nurlina.*

The purpose of this study is to determine the function of financial management in realizing effective financial governance at the Gowa Kabupaen Regional Office, this data was taken at the Gowa Regency Regional Financial Management Agency Office, the type of data used in this study is qualitative data obtained from the results of in-depth interviews related to the problem studied, data collection is carried out by observation and interviews. In this study the data sources used in data collection include pimer data and secondary data, the research instrument used in this study uses mobile phones. Based on the results of the study, it shows that the Gowa BPKD office has carried out effective planning through the Budget Work Plan referred to in the Budget Implementation Document. They also use computerized systems to process financial transactions, simplify reporting, and improve the management of government financial data. Good organization is also seen in the implementation of the financial management function in accordance with the Budget Work Plan contained in the Budget Implementation Document. Overall, the Gowa BPKD office has been successful in planning, organizing, implementing supervision, and achieving a good effectiveness ratio. They have shown a strong commitment in managing government finances with transparency, accuracy, and a high effectiveness ratio shows that financial management at the BPKD Gowa office has run well and efficiently as evidenced by data results from 2021 of 101% and in 2022 of 101%. and supported by the WTP Award received every year is also proof of success in financial management.

***Keywords** : Financial Management Function, Financial Management*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur Alhamdulillah, berkat limpahan dan rahmat, taufiq, inayah, dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Rasa syukur itu semakin bertambah dalam diri penulis ketika skripsi ini dimunaqasahkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi yang berjudul **"Analisis Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Efektif Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.**

Skripsi yang penuplis buat ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Makassar, Dalam penyelesaian penelitian ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, memberikan waktunya serta motivasinya untuk penulis. Oleh karena melalui kesempatan ini, penulis mengucapakn terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua Orangtua Saya bapak Sappewali Dan Ibu Dahlia yang ada dirumah yang tiada henti memberikan doa, motivasi dan semangat, serta pengorbanan mereka berdua selama penyusunan penelitan ini.

Selama proses penyusunan penelitian ini banyak pihak yang memberikan bimbingan, arahan dan bantuan kepada penulis hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Jam'an, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrullah, S.E.,M.M Selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asri Jaya, SE,.M.M selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurlina, SE,.M.M Selaku Pembimbing II yang Selalu Memberikan Ilmu dan Saran yang Sangat Berguna serta sabar mengahadapi penulis.
6. Bapak Dr. Samsul Rizal, S.E,.M.M selaku Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020 terutama kelas M20F
9. Nurfadillah, Ya! Kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses yang panjang selama dibangku perkuliahan, Terimakasih sudah sabar mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan. Tatap bertahan, dan selalu sehat dalam setiap proses skripsi ini dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT.
10. semua keluarga besar dari ayah ibu yang ada di dusun bungaya desa kindamg dan keluarga yang ada dimakassar yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu terimakasih atas kebaikan dan Support yang telah diberikan.

11. Kepada dia yang belum pasti siapa dan dimana yang ditakdirkan oleh Allah untuk hamba dikemudian hari semoga selalu menjaga diri dan memperbaiki diri.
12. Teman-teman saya di organisasi maupun di sekolah menengah terkhusus KB3 VRIPS.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengaharap saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT kita mermohon, berkat rahmat serta limpahan pahala yang berlipat ganda selalu dicurahkan-Nya kepada kita sekalian dan semoga segala niat baik dan suci serta usaha yang sungguh-sungguh mendapat ridha di sisi-Nya, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Makassar, 26 April 2024

Nurfadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN ..... Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah 4
C. Tujuan penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
A. Tinjauwan Teori 5
1. Pengertian Manajemen keuangan 5
2. Fungsi – Fungsi Manajemen 6
3. Pengelolan Keuangan Daerah 10
B. Tinjauan Empiris 16
C. Kerangka Pikir 20
BAB III METODE PENELITIAN **21**
A. Jenis Penelitian 21
B. Fokus Penelitian 21
C. Situs Dan Waktu Penelitian 22
D. Jenis Dan Sumber Data 22
E. Informan 23

F. Teknik Pengumpulan Data 24
G. Instrumen Penelitian 26
H. Metode Analisis Data 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 29
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 36
C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan) 53
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 69

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir 20

3.1 Alir Analisis Data 28

4.1 Struktur Organisasi 32

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

2.1 Tinjauwan Empiris 17

3.1 Informan Penelitian 24

4.1 Laporan Realisasi Anggaran BPKD Gowa 49

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 69

Lampiran 2 Hasil Wawancara 75

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian Dan Surat Balasan ..……94

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian ……...97

Lampiran 5 Hasil Validasi Data …….. …..102

Lampiran 6 Hasil Validasi Abstrak ……..……...103

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi ……..…104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, daerah otonom diberikan otoritas Untuk mengelola daerah Sendiri . Otonomi daerah adalah hak , wewenang , dan kewajiban daerah otonom Untuk mengatur Dan menjaga Sendiri urusan pemerintah Dan minat publik lokal di dalam sistem negara persatuan republik Indonesia . Karena pengelolaan adalah alternatif Untuk mengatur Dan memobilisasi orang lain, organisasi atau lembaga harus memfungsikan Dan menerapkan fungsi pengelolaan dengan bagus untuk terus berjalan menyebar baik Dan Cinta publik.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dipilih sebagai objek penelitian karena lembaga atau kantor tersebut merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memegang peranan dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

faktor pendukung sesuatu lembaga tetap berdiri Dan mengembangkan adalah Bagaimana fungsi pengelolaannya terapan pada sistem mengelola keuangannya , karena faktor utama sesuatu lembaga Bisa tumbuh , bertahan hidup Dan menyesuaikan diri sendiri adalah Jika

aplikasi pengelolaan TIDAK berjalan dengan Oke , agensi TIDAK Mungkin mengembangkan cepat Dan tepercaya oleh publik Untuk mengelola keuangan daerah . Oleh Karena itu , institusi harus Bisa menerapkan fungsi pengelolaan dengan Bagus di dalam setiap operasinya Untuk menghindari tumpang tindih tumpang tindih di dalam bekerja Untuk mencapai objektif institusi .

Tata kelola lembaga dan keputusan manajemen keuangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan lembaga, menurut (Mu'minah 2019) untuk mewujudkan tujuan tata kelola yang efektif maka diperlukan proses manajemen keuangan yang meliputi meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan dan pengelolaan.

Fungsi-Fungsi Manajemen terdiri dari : proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing)*, Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*) (Terry 2021).

Efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan mempergunakan atau memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara ekonomis, hemat (efisien) dan dilakukan secara tepat dan memenuhi sasaran (efektif) serta hasil yang dicapai tersebut memilki rasionalitas terhadap penggunaan sumber-sumber yang ada (produktivitas).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji temuan-temuan penelitian terdahulu terkait dengan peranan fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif. Dari beberapa permasalahan temuan penelitian yang ada, berdasarkan studi pustaka yang diperoleh dari hasil temuan-temuan penelitain terdahulu

bahwa proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa masih dihadapkan pada permasalahan pokok, yang terdiri dari masalah penyampaian laporan keuangan.

Salah satu tujuan utama rencana dan keinginan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah menyampaikan laporan keuanganya selesai tepat pada waktunya. Adapun laporan keuangan di bidang keuangan dan pelaporan badan keuangan daerah Gowa mempunyai tugas dan fungsi mengelola keuangan pemerintah daerah, namun dalam pengelolaanya di badan keuangan daerah Kabupaten Gowa dihadapkan pada permasalahan terhadap ketersediaan dana yang tidak tepat waktu sehingga banyak satuan kerja perangkat daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuanganya kepada badan keuangan daerah sehingga menghambat kebijakan keuangan dan pelaporan yang mengakibatkan badan keuangan daerah menjadi kurang maksimal.

Penatausahaan keuangan daerah terdapat kekurangtegasan peraturan tentang pengelolaan asset daerah, Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen untuk dapat mempermudah tugas pelaporan dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif pada Kantor Daerah Kabupaten Gowa. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu ‘’**Analisis Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Efektif Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ?.

C. Tujuan penelitian

Tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan dapat mendeskripsikan tata kelola keuangan yang efektif pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah maupun lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen keuangan sehingga dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas keuangan, dan diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan BPKD Gowa dan manajemen kantor dalam menyusun rencana, strategi, dan kebijakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan lembaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauwan Teori

1. Pengertian Manajemen keuangan

Manajemen berasal dari kata Bahasa inggris *management* yang dikembangkan dari kata *to* manage, yang artinta mengatur. yang berasal dari kata italia *maneggio* yang berasal dari Bahasa latin *managiare* yang berasal dari kata *manus* yang artinya tangan (Amalia 2018). Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen mempunyai pengertian sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran. Namun dalam kamus besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Berikut pengertian manajemen antara lain :

a. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain (Terry 2021).
b. Manajemen merupakan suatu usaha seni, kemahiran penerapan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Saharuddin, Patra, and Sanaria 2019).
c. Manajemen keuangan merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam mengelolah keputusan-keputusan yang

menyangkut masalah financial perusahaan (Firmansyah and Aulia 2020).

d. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia seperti manusia, modal, keahlian, dana , serta sumber daya lainya, dengan mengoordinasikan upaya dan mendayagunakanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Masalah 2010).

2. Fungsi – Fungsi Manajemen

Setelah memahami apa itu manajemen, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang tediri dari beberapa tahapan tindakan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau individu. Kegiatan atau aktifitas ini disebut fungsi manajemen.

Menurut (Saharuddin, Patra, and Sanaria 2019) Fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan Tingkatan -tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut, dan juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, fungsi manajemen ini saling berhubungan secara dinamis. Adapun fungsi manajemen adalah Sebagai berikut:

a. Menurut (Terry 2021)

1) Perencanaa (*planning)* perencanaan adalah menentukan tugas yang harus dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan juga mencakup proses pengambilan keputusanUntuk menyusun suatu pola dari kumpulan tindakan untuk masa depan, diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan. Dalam administrasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan. Rencana adalah menetapkan keputusan yang digunakan untuk mengatur bagaimana kegiatan akan dilakukan. Rencana yang baik harus diarahkan ke tujuan (*goal oriented).*

a) Apa yang akan dicapai, berkenaan dengan penentuan tujuan
b) Mengapa hal tersebut perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan motif perlunya kegiatan itu.
c) Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya.
d) Bilamana akan dilaksanakan, berkenaan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai.
e) Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
f) Mengadakan penilaian, berkenaan dengan kegiatan, mana yang telah selesai, sedang dan diselesaikan.

g) Kemungkinan apa yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana.

2) Pengorganisasian (*organizing)* manajer harus merancang dan membangun suatu organisasi atau lembaga yang dapat melaksanakan berbagai program setelah menetapkan tujuan dan membuat rencana atau program untuk mencapainya.

a. Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
b. Perencanaan dan pengembagan kelompok kerja atau organisasi yang dapat membawa hal-hal kea arah tujuan
c. Penugasan tugas tertentu. Pendelegasian tanggung jawab.

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan, artinya tugas pimpinan untuk mengorganisasikan bagian satu dengan Bagian yang lain untuk mencapai tujuan adalah mengorganisasikan mereka.

Hal Ini akan menghasilkan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab bagi setiap anggota staf. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan pada seorang saja. Selain itu, dengan membagi tugas-tugas ini, mereka dapat membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan teratur. Persyaratan pengorganisasian adalah sebagai berikut :

a) Membagi dan menggolongkan tindakan dalam kesatuan tertentu.
b) Menentukan dan menetapkan tugas untuk masing-masing kesatuan serta menempatkan pelaksanaan untuk tugas tersebut.
c) Memberi wewenang kepada masing-masing pelaksanaan.
d) Menetapkan jalinan hubungan.

3) Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan pekerjaan yang ditetapkan oleh unsur prencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan. *Actualing* adalah menggerakkan dan memberi perintah kepada seluruh bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan organisasi karena juga merupakan inti dari manajemen. Jika tidak ada pergerakan, rencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada energy pendorong untuk melakukan tugas dan bekerja sama. Setelah menetapkan rencana, pergerakan merupakan langka berikutnya. Disini, pelaksanaan diberi tugas untuk segera menyelesaikanya.

a. Dalam pelaksanaanya pergerakan yang dilakukan adalah Memberikan motivasi
b. membimbing,
c. menjalin hubungan,

d. mengatur komonikasi

e. mengembangkan atau meningkatkan pelaksanaan (orang yang berkembang).

4) Pengawasan (*controlling)* semua tindakan yang diambil oleh organisasi pengawasan merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan dan maksud organisasi. Pengawasan manajeman adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumya, menemukan dan mengukur penyimpangan, dan mengambil tindakan korelasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi digunakan dengan paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan (Terry 2021).

3. Pengelolan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut beberapa pengertiam pengelolaan keuangan:

1) Pengelolaan keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan asset dengan beberapa tujuan menyeluruh (Mu'minah 2019).

2) tugas utama pengelolaan uang adalah proses penganggaran, dengan tujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diperoleh dalam periode yang sama. Pengelolaan keuangan (Indriakati and Sahrul 2022)

3) Pengelolaan keuangan adalah cara mengatur dan mengendalikan keuangan serta aset yang dimiliki guna memenuhi segala kebutuhan hidup saat ini dan dimasa yang akan datang secara produktif (Mallolongeng. Fitrah, Nasrullah, Sidjara. Sahlan, Lukman. Faturachman 2022).

APBD : Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpadu yang diatur dalam APBD tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan diimplementasikan sebagai "proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak faktor". Pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur anggaran tahun berikutnya. Segala sumber daya keuangan daerah yang diterima dan digunakan wajib dicatat dan diawasi dalam APBD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. Pada tahun anggaran, APBD berfungsi sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dan merupakan rencana umum pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah pada masa desentralisasi. Dengan cara yang sama, semua biaya dan tanggung jawab

APBD juga berfungsi sebagai dasar pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Agar pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara bersamaan, maka APBD dan APBN

ditetapkan dilaksanakan pada tanggal yang sama, yakni tanggal 1 Januari. Untuk menyusun APBD digunakan pendekatan kinerja; Merupakan suatu sistem penganggaran yang menggunakan pencapaian hasil kerja atau keluaran dari masukan atau perencanaan alokasi biaya. Besarnya pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur dan masuk akal. Pagu anggaran merupakan batas tertinggi pengeluaran. Pastikan pendapatan mencukupi dan anggaran belanja didukung oleh pembiayaan. Setiap pejabat dilarang melakukan hal tersebut jika anggaran tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk menutupi biaya-biaya tersebut.

Keuangan daerah dikelola dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kemaslahatan masyarakat. Dikelola secara tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab (Terry 2021). Berikut uraian prinsip umum pengelolaan keuangan daerah:

a. Keuangan daerah dikelola tepat waktu dan diperoleh bukti penyelenggaraapemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Efektif: Mencapai hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil.

c. Efisiensi: Mencapai keluaran maksimum dengan masukan tertentu atau menggunakan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
d. Ekonomis : Memperoleh masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah.
e. Transparan: Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan apa yang dibutuhkannya.
f. Menunjukkan bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang diberikan kepadanya untuk mencapai tujuan.
g. Keadilan: Keseimbangan distribusi kekuasaan dan dana, atau keseimbangan distribusi

b. Proses Pengelolaan Keuangan

Analisis keuangan adalah dasar keuangan yang dapat membantu manajer membuat keputusan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (Mu'minah 2019). Pengelolaan keuangan terdiri dari empat kerangka dasar.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapainya. Merumuskan target keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan, adalah salah satu kegiatan perencanaan keuangan, penyusunan anggaran juga

merupakan proses untuk membantu pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian dengan baik (Mu'minah 2019). Anggaran adalah perencanaan perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif (Mu'minah 2019).

Perencanaan keuangan dibutuhkan untuk dapat menyusun kebutuhan dana untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastiaan masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya.

2. pencatatan

Mencatat transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis termasuk pencatatan. Pencatatan sendiri digunakan sebagai alat untuk menunukan bahwa transaksi telah tejadi pada waktu tersebut. Nota, kuitansi, faktur, dll. Adalah contoh pencatatan langka berikutnya adalah menerbitkan transaksi dalam jurnal dan kemudian dipublikasikan dalam buku besar. Untuk memulai pencatatan, anda harus memahami prinsip dasar pencatatan transaksi keuangan, yang mirip dengan prinsip akuntansi :

Harta = Hutang + Modal

Atau Aktiva = Passiva

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan kuangan sbagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan kuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Mu'minah 2019) kegiatan dari pengendalian, salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan dan pengendalian umpan balik.

c. Tujuan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (*accountability*)
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*efectiveness*) dan daya guna *(effiency*) Pengendalian

B. Tinjauan Empiris

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka penulis akan mengutip beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitidan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Ilmu et al. 2015)	Fungsi manajemen pengelolaan perpustakaan umum di kantor arsip dan perpustakaan daerah kabupaten serang	Kualitatif	wawancara	Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi manajemen pengelolaan perpustakaan umum di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang belum berjalan dengan maksimal, disebabkan pedoman teknis pengelolaan perpustakaan yang masih terbatas terkait penyelenggaraan perpustakaan digital dll.
2	(George. R. Terry dan Leslie (2014) 2019)	Analisis Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Donasi Umat Pada Yayasan Posko Yatim Indonesia	Kualitatif	Observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyaluran donasi umat pada Yayasan Posko Yatim Indonesia: (1) Penerapan fungsi perencanaan sudah terprogram dengan baik.
3	(Dewi Mahmuda 2019)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah (Bpkapd) Kota Baubau	Deskriptif Kualitatif	Wawancara	Hasil penelitian menunjukkanbahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Baubau tahun 2015 sampai 2017 belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Terbukti dengan hasil perhitungan rasio kemandirian selama tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 102,79%., 119,97% dan 102,29%

4	(Saharuddin, Patra, and Sanaria 2019)	Analisis Fungsi – Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mandala Multi Finance Kabupaten Luwu Utara	Analisis Deskriptif Dan Regresi Sederhana	Kuesioner	Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana yaitu variabel fungsifungsi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Mandala Multi Finance di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini di tunjukkan dari nilai thitung = 4,110 pada taraf nyata (p = 0,001 < α = 0,05) atau thitung (4,110) > ttabel (2,179).
5	(Mu'minah 2019)	Pengelolaan Keuangan: (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang)	Kualitatif	metode dokumentasi	Hasil analisis data menunjukkan bahwa Usaha Mikro Omah Kripik Mbote sudah menerapkan Pengelolaan keuangan namun masih belum efektif dalam menerapkannya.
6	(Amalia 2018)	Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sdn 30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep	Kualitatif	Wawancara, Observasi	Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen di SDN 30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep tergolong baik, terbukti dari terpenuhinya semua kegiatan dalam proses pelaksanaan fungsifungsi manajemen.
7	Elyang (Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov . Sul - Sel Tahun 2016 – 2017 Skripsi Oleh Elyang 2019)	Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Prov. Sul - Sel Tahun 2016 – 2017	Kuantitatif	Observasi	Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data perencanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang efisien di tahun 2016 sampai dengan

					2017 , yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya
8	(Radjak and Taidi 2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Tolangohula	Kualitatif	Wawancara, Observasi	Puskesmas Tolangohula dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai dengan Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Tolangohula dengan mematuhi beberapa prinsip tata kelola keuangan yaitu Transparansi dan Independensi.
9	(Ainun 2021)	Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah Dari Sudut Pandang Kepemerintahan Yang Baik	Kualitatif	Wawancara	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tata kelola keuangan di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan unsur kepemerintahan yang baik.
10	(Indriakati and Sahrul 2022)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Kabuptaen Soppeng	Kuantitatif	Kuesioner	Dari hasil analisis deskriptif pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan secara umum pegawai sudah memahami dan mengetahui manfaat dan tujuan SIMDA Keuangan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Ainun 2021) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitati, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian hanya kepada analisis penerapan fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa".

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada *output* dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending

wisely. Menurut (Dinas et al. 2016) Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan sebuah data maka peneliti harus menentukan lokasi yang akan diteliti maka obyek pelaksanaan penelitian ini dilakukan dikabupaten Gowa dengan data yang akan dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupeten Gowa bertempat di Jl. Masjid Raya No.36, Sungguminasa, Kec, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi selatan 92111, untuk pengambilan data tata kelola keuangan yang sesuai dengan fungsi manajemen keuangan. Dan waktu penelitian yaitu dua bulan terhitung dari bulan desember sampai januari setelah dilakukanya seminar proposal, guna agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terbukti kebenaranya.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Informasi yang diperoleh memberikan keterangan, gambaran, atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk

huruf maupun bilangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti untuk menggali informasi dan relevan dengan masalah penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen dari hasil pencatatan keuangan yang ada di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Adapun data penelitian terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu:

1. Data subyek

   data subyek adalah data penelitian yang disampaikan sendiri oleh responden secara individu atau secara kelompok sumbernya.

2. Data fisik

   Data fisik adalah Ini adalah jenis data peneltian yang berupa hal-hal fisik, seperti buku, bangunan, pakaian, atau bagian dari bangunan.

3. Data documenter

   Data documenter adalah Ini adalah jenis data penelitian yang berupa surat-surat faktur, jurnal, surat-surat, notulen rapat, memo, atau laporan program.

E. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Terry 2021). Pemanfaatan Informan dalam penelitian ini bertujuan agar dalam waktu yang terbatas peneliti dapat

menjaring banyak informasi. Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karna penelitian ini mengkaji tentang analisis fungsi manajemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif di kantor BPKD Gowa, maka penentuan informan dalam penelitia ini menggunakan teknik *purposive* (bertujuan), menurut (No Title 2023) teknik *purposive* yaitu merupakan metode penetapan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.

Table 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa	1	Key Informan
2	Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	Informan
3	Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan	1	Informan
4	Sub Bagian Akuntansi Keuangan	1	Informan
	Total	**4**	

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Yang Penulis Lakukan Adalah, Sebagai Berikut:

1. Observasi

   Digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat kegiatan pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa secara langsung untuk menemukan dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Wawancara (*interview*)

Dalam survei, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Peneliti akan mewawancarai para pemimpin dan pegawai Badan Pengelola Keuangan Derah Kaupaten Gowa untuk mempelajari tentang organisasi secara keseluruhan, Lokasi, dan system pengelolaan keuangan yang diterapkan. Datar wawancara terlampir dibagian lampiran.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara yang dipakai untuk memperoleh data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam *(in-detph interview),* observasi partisipasi *(participant observer)* sebagai pendukung, wawancara dan analisis dokumen (Terry 2021).

Metode ini digunakan untuk mendapat data-data yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara agar validitasnya tidak diragukan lagi.

G. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu berupa: Perekam suara, Alat tulis, Daftar pertanyaan wawancara. Buku, jurnal, dan referensi lainnya

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Metode menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Terry 2021).

Setelah mengumpulkan data, penulis membuatnya disusun dan diklarifikasi untuk dijelaskan dan diinterpreytasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sehingga orang dapat memahaminya dan membuat kesimpulan tentang hasil penelitian.

1. Reduksi data (*data reduction*)

   Reduksi Data Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data (*data display*)

   Langka selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data, Penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan. kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada data kualtatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Penarikan kesimpulan (*condusion drawing*)

   Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan-catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan sponsor.

   Dalam analisis data, penulis menggunakan dua model, model yang dimaksud adalah model alir dan model interaktif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif, dimana model interaktif ini reduksi data dan penyajian data memperhatikan hasil data yang dikumpulkan, kemudian pada proses penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 3.1 Alir Analisis Data

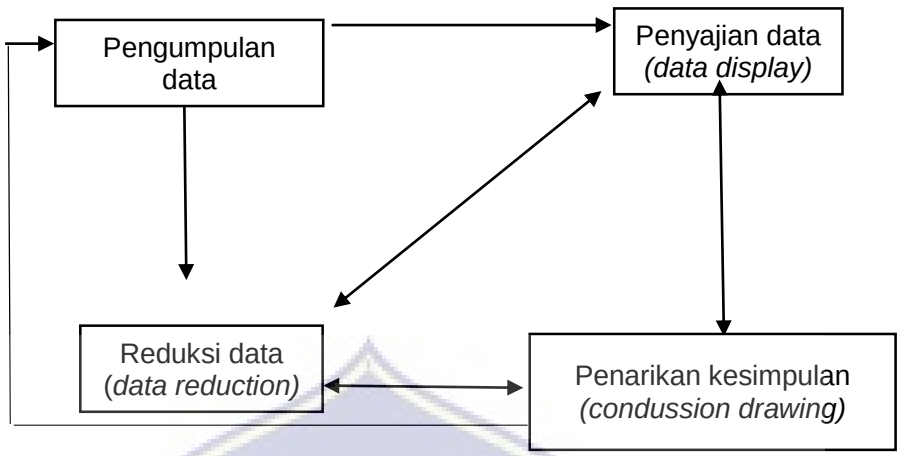

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan tentang Gambaran umum badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa (BPKD) Gowa.

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

   Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa pada Januari 2017 berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah serta peraturan Bupati Gowa Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

   Badan Penelolaan Keuangan Daerah bernama Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yang terbentuk pada awal tahun 2009 yang merupakan gabungan dari dua instansi pemerintah yaitu dinas pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di sektor Pendapatan Daerah dan Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tupoksi di bidang belanja daerah, penatausahaan dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Latar belakang terbentuknya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerha Dinas Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa kedudukannya adalah unsur pelaksanaan teknis operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

tahun 2017 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tupoksi disektor pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan Badan yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang perencanaan, perbelanjaan daerah, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien telah ditetapkan aturan bagi para pemegang jabatan struktural maupun non struktural sebagai perangkat daerah dan unsur pelaksana otonomi daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa secara administratif berkedudukan di Sungguminasa yang merupakan

Ibu kota Kabupaten dan sebagai daerah penyanggah kawasan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk tetap logis dalam masa otonomi daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan Kabupaten /kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten yang handal di Sulawesi Selatan(Sistem et al. 2017).

a. Visi dan misi organisasi

1) Visi

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menetapkan visi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut: "Terwujudnya pengelolaan keuangan yang handal dan akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintah yang baik"

2) Misi

Mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan bersama, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahu 2021 yaitu sebagai berikut:

a) Mewujudkan kualitas layanan kesekretariatan
b) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien
c) Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.

b. Struktur organisasi dan *job description*

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

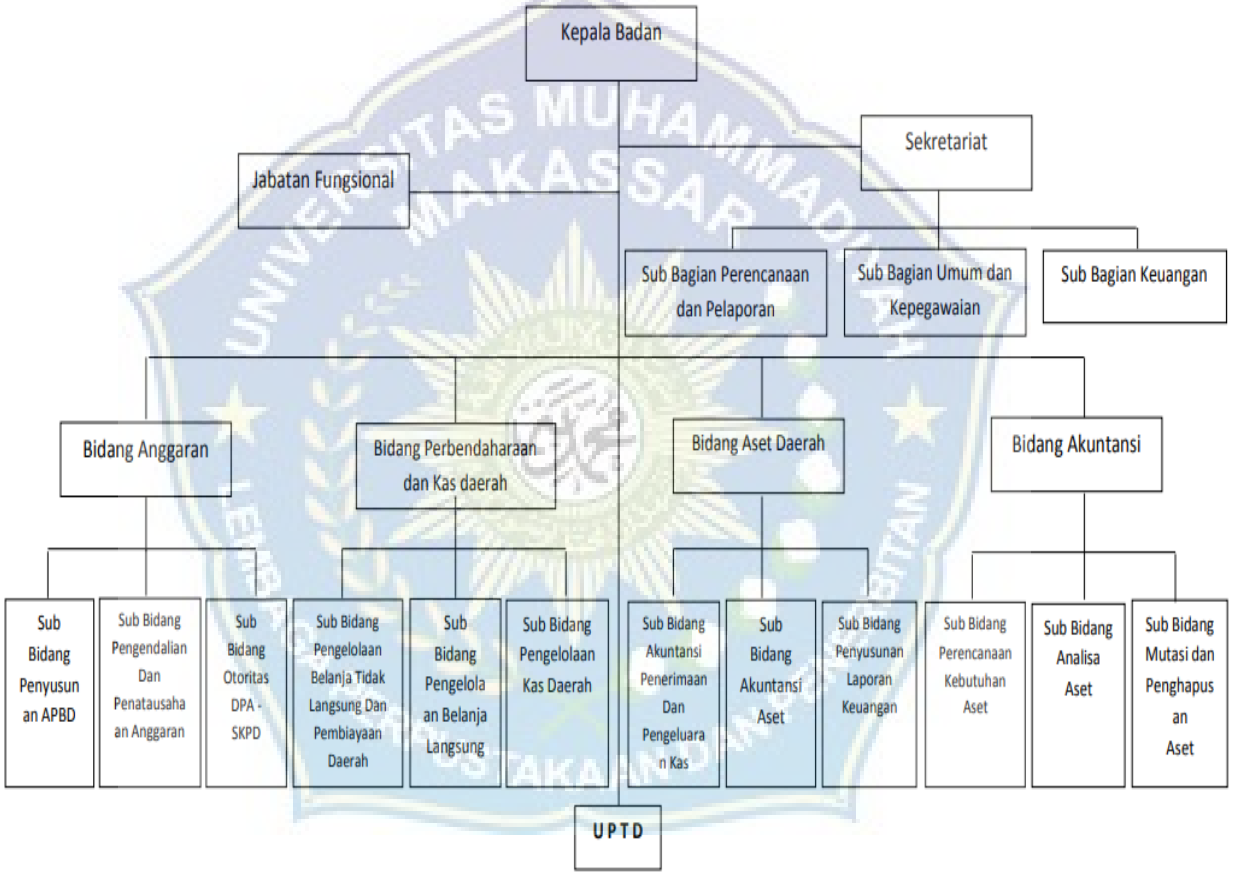

1. Tugas pokok badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa

   Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa yaitu:

   a. Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan Badan.

   1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
   2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.
   3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1) Sub Bidang Penyusunan APBD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2) Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan pengendalian dan penatausahaan anggaran.
3) Sub Bidang Otoritas DPA-SKPD dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melakukan otoritas DPA-SKPD.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan perbendaharaan dan kas daerah.
   1) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
   2) Sub Bidang Pengelolaan Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan belanja langsung.
   3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah.

e. Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan pelaporan aset daerah.

1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam perencanaan kebutuhan aset.

2) Sub Bidang Analisa Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan analisa aset.

3) Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melakukan mutasi dan penghapusan aset.

f. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1) Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran kas.

2) sub Bidang Akuntansi Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan pelaporan akuntansi aset.

3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan daerah.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan desember Dimana seluruh informan yang melakukan wawancara mendalam adalah kapala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian akuntansi keuangan dan sub bagian perencanaan dan pelaporan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan dan pelaporan. tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa,

1) Fungsi perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan perencanaan pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa menurut Bapak (AK) , Bapak (IS), Ibu (HW) dan Ibu (AH) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pelaporan, Bagaimana tahap perencanaannya, dan

dengan adanya perencanaan anggaran ini apakah pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa sudah efektif?

> “Proses perencanaan itu setiap tahunnya dimulai dari musrembang desa, Kecamatan, Kabupaten sampai forum SKPD itulah dasarnya untuk membuat namanya RKPD sebagai dasar untuk menyusun APBD menyusun KUA PPAS Selanjutnya APBD Ditetapkan dasar dari RKPD selanjutnya APBD dievaluasi di provinsi terus disahkan dari Bupati lalu dilaksanakan” **(Pak AK)**

> “perencanaan yang dibuat oleh BPKD Gowa setiap tahunya adalah perencanaan keuangan, proses perencanaanya yang pertama yaitu melakukan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) menyangkut dari semua bidang diminta untuk memasukkan rencana anggaran nya karna disetiap bidang punya rencana kegiatanya masing-masing yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk Jangka Waktu 5 Tahun, Serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek Atau Rencanan Tahunan Yang Dikenal Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan lalu disusun menjadi rencana kerja anggaran (RKA) dari RKA tadi setelah disetuji oleh PERDA DPR semua tahapan penggaranya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanaan kegiatan atau pelaksanaan anggaran dari DPA ini menjadi dasar pencairan anggaran.”**(Ibu HW)**

Hal senada juga disampaikan ketua sub bagian umum dan kepegawaian kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa dimana :

> “peramalan yang dibuat dalam bentuk RKA setiap tahunya dengan itu memprioritaskan kebutuhan apa yang harus dibuat dan dipenuhi tahun itu tetapi disesuakn dengan jumlah dana yang tersedia, dalam proses RKA itu dilakukan rapat internal semua bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidang yang ada dikabupaten gowa, kira-kira program kerjanya kedepanya apa dan disesuaikan dengan anggaran untuk kebutuhan program tersebut mengenai juga dengan kemampuan keuangan yang di berikan”.**(Pak IS)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff yang bertugas di bagian sub perencanaan dan pelaporan dan ketua sub bagian umum

dan kepegawaian tentang penerapan fungsi perencanaan manajemen keuangan di kantor BPKD Gowa sudah dilakukan dan terbilang cukup baik dilihat dari pelaksanaan pencatatan anggaran yang dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pemaparan dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan dalam memulai pengelolaan keuangan agar dalam pengelolaan keuangan bisa terarah dan berjalan dengan efektif.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Gowa sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan sistem manual atau penyusunannya menggunakan Microsoft Excel.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala sub bagian umum dan kepegawaian, mengenai dalam pengelolaannya menggunakan aplikasi apa?

> "menggunakan aplikasi ekmis dari BPKPRI tahun sebelumnya dinamakan simda tapi semua prodaknya dari BPKP dari simda dan 2 tahun ini dinamakan ekmis" 2021 kebawah dinamakan simda 2022-2023 ekmis yang mencatat anggaran yaitu semua bidan yang ada di BPKD Gowa seperti bidan anggaran ada penatausahaan, akuntansi, khusus dibidang aset menggunkan aplikasi simda BMD Khusus utuk pengelolaan barang milik daerah".**(Pak IS)**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari staff sub bagian akuntansi keuangan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa :

> "dimana pelaporan masih menggunakan aplikasi ekmis yag dari BPKP tapi untuk 2024 diwajibkan untuk menggunakan SIPD RI untuk proses penganggaranya dimana di aplikasi ekmis itu belum termasuk perencanaan belum termasuk didalamnya baru penatausahaan, penganggaran dan pelaporan di ekmis pengelolaan keuanganya**."(Ibu AH)**

Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Bagaimana cara mengatur agar penyaluran dana tepat waktu? Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Bagaimana cara memastikan kelancaran kas?

> "Penyaluran dana setiap tahunnya itu tepat waktu itu semua sudah ada tupoksinya sudah ada di Perda (peraturan daerah) perup (peraturan bupati) tentang pengelolaan keuangan daerah terkait dengan Bagaimana menyusun APBD diusahakan terus

mengakuntansikan dan melaporkan ke BPK untuk di audit" **(Pak AK)**

"Setiap tahun disusuna perencanaan anggaran setelah ditetapkan anggaran lalu menyusun anggaran kas, dengan penyusunan anggaran itu di jadikan pedoman untuk pelaksanaan penyusunan anggaran sehingga dalam penyusunan tersebut berjalan dengan baik dan dalam penyaluran dananya tepat waktu. Dalam penyusunanya disusun kira-kira kegiatan itu dilaksanakan bulan januari-desember dibuatkan skema, bulan berapa dilaksanakan supaya kegiatan kegiatan terjadwal".**(Ibu AH)**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh ketua sub bagian umum dan kepegawaian

"untuk kelancaran kas dikelola oleh sub bidang pengelolaan kas daerah yang mencatat berapa uang yang masuk dan uang yang keluar setiap hari jadi terdapat control dana anggaran daerah (DAD) yang masuk, berapa uang transfer yang masuk dari pusat termasuk belanja provinsi jadi sudah ada sub bagian yang mengelola dan mengatur kas untuk memastikan kelancaran proses pemerintahan daerah"
"dalam penyusunan pencatatan yang dilakukan diawali dari tahap pengumpulan dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan setiap kejadian transaksi keluar-masuk".(**Pak IS)**

Berdasarkan wawancara tersebut analisis penelitian penerapan fungsi perencanaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif yaitu dilakukan dengan cara menyusun anggaran berpedoman pada RKA yang telah disusun sebelumnya dan untuk memastikan kelancara kas dilakukan pada sub bidang pengelolaan kas yang selalu mencatat uang yang masuk dan keluar dan dalam penyaluran dana setiap tahunnya disalurkan sesuai dengan jadwal dilaksanakan bulan januari-desember dibuatkan skema, melalui rapat staf.

Kantor BPKD Gowa telah melakukan perencanaan yang efektif dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dasar Pelaksanaan Anggaran). Mereka menggunakan sistem

komputerisasi untuk mengolah transaksi keuangan, mempermudah pelaporan, dan meningkatkan pengelolaan data keuangan pemerintah. Dalam hal anggaran, terdapat tiga laporan yang dihasilkan dari sistem Simda Keuangan, yaitu RKA, DPA, dan SPD. RKA merupakan laporan yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan DPA memuat dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, laporan penatausahaan juga dihasilkan, seperti SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), STS (Surat Tanda Setoran), dan surat pengendalian. Laporan-laporan ini membantu dalam mengontrol dan mengawasi pengelolaan keuangan

2) Fungsi pengorganisasian

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan pengorganisasian pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa menurut Bapak (AK), (IS) dan Ibu (AH) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

Berhasilnya organisasi atau lembaga tidak terlepas dari faktor tenaga kerja pengorganisasian yang dilakukan untuk menentukan tugas apa yang dikerjakan siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab (Iv et al. n.d.), Hal ini disampaikan oleh staff bagian akuntansi keuangan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa Melalui wawancara yang dilakukan kepada kepala sub bagian umum dan kepegawaian Bagaimana pembagian tugas dalam bagian pengelolaan keuangan ini, apakah sudah sesuai dengan bidan nya masing-masing?

> “tentu ini Semua sudah dijabarkan di tupoksi khususnya di bpkd terbagi dari 4 bidang satu sekretaris ada bidang akuntansi aset anggaran dan perbendaharaan dan kesekretariat itu semua dibagi tugas-tugasnya dan alhamdulillah dan selama ini pengelolaan keuangan bpkd kita sudah 11 tahun WTP” **(Pak AK)**
>
> “untuk pembagian tugas sudah ditetapkan pada peraturan bupati dan diperaturan bupati itu sudah jelas tentang pembagian tugas dan pegawai tinggal menunggu penempatan saja setalah dilakuan pelantikan”. **(Pak IS)**

Hal ini disampaikan juga oleh sub bagian akuntansi keuangan mengenai kebijakan yang diberikan pemerintah daerah Apakah ada peraturan tertentu terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa?

> “iya ada kebijakanya, misalkan masalah retribusi, pajak, semuanya diatur dalam kebijakan tersebut”. **(Ibu AH)**

Berdasarkan wawancara di atas maka di dapatkan hasil bahwa pembagian tugas dalam bagian pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pembagian tugas ini telah dijabarkan dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang terbagi menjadi empat bidang, yaitu sekretaris, akuntansi aset, anggaran dan perbendaharaan, serta kesekretariatan. Selama ini, pengelolaan keuangan BPKD Kabupaten Gowa telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Gowa juga memberikan kebijakan tertentu terkait pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini mencakup masalah retribusi, pajak, dan hal-hal lain yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi atau lembaga pengelolaan keuangan di Kabupaten Gowa telah berhasil dalam pengorganisasian tenaga kerja dan telah mematuhi peraturan bupati terkait pembagian tugas serta kebijakan pengelolaan keuangan

daerah.

3) Fungsi pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan pengorganisasian pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa menurut Bapak (AK), (IS) dan Ibu (AH) (HW) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

> "Pengendalian itu tadi sudah digariskan oleh aturan kapan kita harus melakukan penyusunan APBD, kapan kita harus melakukan sosahlisasi terhadap Bagaimana pengelolaan keuangan yang bagus dan tepat waktu kapan kita akan melakukan perubahan Kapan kita akan melakukan bukti-buku itu sudah diatur dan itu yang kita ikuti tidak boleh tifdak, kapan kita vtidak ikuti itu maka WTP itu tidak mungkin kita bisa capai" **(Pak AK)**

> "sejauh ini pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, adapun dorongan yang diberikan berupa penyediaan anggaran pembayaran lembur kepada pegawai yang bekerja diluar jam kerja"
> "ya, pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa sudah efektif karna setiap SKPD dalam pelaksanaan anggaranya telah menyesuaikan dengan DPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran". **(Pak IS)**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan staff bagian perencanaan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa :

> "ya, pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa sudah efektif karna setiap SKPD dalam pelaksanaan anggaranya telah menyesuaikan dengan DPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran". **(Ibu HW)**

Dan pernyataan yang disampaikan oleh staff bagian akuntansi keuangan badan pengelolaan daerah kabupaten gowa

> "iya sudah, karna terkait dengan aplikasi ini masalah pengelolaan keuangan begitu telah selesai mengimput pendukung yang dibutuhkan terus membuat jurnal penyesuaiaian di akhir tahun maka laporan itu akan selesai, dan jikapun ada masalah maka akan terus dilakukan evaluasi dan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga proses pelaporan di kantor BPKD Gowa selesai tepat waktu". **(Ibu AH)**

Adapun penjelasan yang disampaikan informan melalui

wawancara yang dilakukan peneliti pengenai penyaluran dana di kantor BPKD Gowa disampaikan sebagai berikut : Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sub bagian umum dan kepegawaian

> "iya, dana yang diterima kantor BPKD Gowa disalurkan tepat waktu" Hal ini disampaikan oleh staff bagian akuntansi keuangan
> "iya disalurkan tepat waktu, karna setiap tahunya diusahan penyaluran dana dan pelaporan itu tepat waktu karna tidak mau ada pemotongan dll, jadi ada aturan mengenai jadwal pelaporan mengenai berapa dana yang disalurkan dan kapang disalurkan serta batas waktu penyalurannya itu dirangkum semua dalam aplikasi dalam bentuk DAU dan laporan dana alokasi khusus DAK dimana jadwal akhir pelaporan kontraknya setiap tahun 21 juli sebagian dari dana yang turun dan jadwal setiap anggaran berbeda-beda dimana khusus DAK itu ada namanya DAK Fisik dan non fisik yang mana dak fisik itu harus ada yang namanya kontrak yang di upload pelaporan-pelapran tahun sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk dana bisa turun dan disalurkan, kalau dak non fisik itu tidak ada kontrak cuman di upload saja realisasi atau penggunaan tahun sebelumnya". **(Ibu AH)**

Hasil wawancara tentang penerapan fugsi pelaksanaan dalam mewujukan tata kelola keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa dilakukan dengan melaukan evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuanganya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman RKA dan DPA yang telah dibuat, dan didapatkan pula bahwa BPKD Gowa melakukan penjalinan hubungan baik dengan staff dengan melakukan kegiatan yag melibatkan seluruh staff dan keluarganya, dan dalam pelaksanaan pengelolaan jika dalam pelaksanaanya terdapat kendalam maka dilakukanlah rapat staff untuk mencari solusinya serta Pengendalian yang dilakukan sudah digariskan oleh aturan kapan akan dan harus melakukan penyusunan APBD.

4) Fungsi pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaksanaan pengorganisasian pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa menurut Bapak (AK), (IS) dan Ibu (AH) maka peneliti mendeskripsikan hasil wawancara sebagai berikut:

Strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan? Hal ini disanpaikan oleh kepala Kepala BPKD Gowa.

> "kendalanya itu tentu setiap tahun pengolahan keuangan itu semakin Kompleks tentu kita harus siap untuk melakukan penyesuaian tetapi kita harus tetap belajar karena peraturan itu setiap tahun selalu mengalami perubahan-perubahan penyesuai tentu mengarah lebih bagus. Kita di kantor BPKD itu semua satu tim kalau ada yang dikerja kita harus bekerja bareng-bareng kalau ada yang harus diselesaikan harus disesuaikan dan itu semua sesuai dengan tupoksi masing-masing Tapi itu semua harus bergerak secara tim harus sama-sama menyelesaikan masalah biar masalah itu cepat selesai**" (Pak AK)**

> "yaitu selalu evaluasi dan banyak belajar jika ada pelatihan mengirim staf untuk menyesuaikan perkembagan digitalisasi termasuk dengan peraturan terbaru setiap ada aturan baru diikuti dan dipelajari bersama seupaya tidak ketiggalan dengan yang lain".**(Pak IS)**

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh sub bagian akuntansi keuangan

> "jadi laporan setiap bulanya tu dari SKPD setiap tanggal 10 bulan berikutnya ada namanya laporan pertanggungjawaban setiap bulan, terus ada laporan tahunanan, dan laporan dari BPKD itu sendiri dari BPKD itu sendiri tapi sekarang tiap bulan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran ke provinsi**".(Ibu AH)**

Mengenai pengawasan Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Apakah ada pengarahan tertentu dari pimpinan berkaitan dengan tujuan lembaga kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan? Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKD Gowa.

> “aturan tertentu itu tidak ada secara spesifik semuanya itu yang namanya pengelolaan keuangan itu Aturannya sudah jelas baik itu undang-undang peraturan pemerintah peraturan mentri keuangan sekaligus peraturan daerah yang kita dibuat sendiri dan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu acuanya dari uu permendagri dan peraturan mentri keuangan, dari segi pengawasan disamping kita melakukan pengawasan ketua bidang tentu juga ini tidak lepas dari pengawasan ekspaktorat dan setiap tahunya kita itu diawasi oleh BPK dilakukan audit **”(Pak AK)**

> “iya, selalu diadakan rapat evaluasi minimal satu kali dalam sebulan yaitu rapat staf disampaikan apa-apa progres yang harus diselesaikan setiap ada masalah maka dilakukan rapat staf untuk mendapatkan solusi, penerpan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah setiap kegiatan di kantor BPKD Gowa telah dilaukan maka dibuatkan laporan pertanggungjawabanya dan setiap bulanya laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) yang ada di kantor BPKD Gowa muat di website humas BPKD Gowa sehingga smua bisamelihat laporan tersebut secara transparan**.”(Pak IS)**

Kemudian peneliti menggali informasi dengan pertanyaan, Bagaimana kontrol finansial yang digunakan untuk melihat kinerja kantor BPKD Kabupaten Gowa?

> “itu yang saya bilang tadi pengawasan itu tentu dilakjukan oleh Kepala SKPD Dan saya selaku kepala BPKD akan melakukan penguasaan secara berjenjang selanjutnya tentu secara berjenjang itu ke sekretaris dan kepala bidang dan selanjutnya kepada sekretaris dan bidang itu melakukan evaluasi secara berjenjang ke bawah”(**Pak AK)**

> “yaitu dengan melakukan rapat semua kegiatan dan yang sudah direalisasikan di tuangka dalam rapat jika ada kendala maka juga diselesaikan dalam ruang rapat jadi dilakukan kontrol sampai dimana pelaksanaan keuangan minimal ada namanya laporan perbulan’’**.(Pak IS)**

Dari wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, ketua sub bagian umum dan kepegawaian tentang penerapan fugsi pelaksanaan dalam mewujukan tata kelola keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa dilakukan dengan melaukan evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuanganya dan dilaksanakan sesuai

dengan pedoman RKA dan DPA yang telah dibuat, dan didapatkan pula bahwa BPKD Gowa melakukan penjalinan hubungan baik dengan staff dengan melakukan kegiatan yag melibatkan seluruh staff dan keluarganya, dan dalam pelaksanaan pengelolaan jika dalam pelaksanaanya terdapat kendalam maka dilakukanlah rapat staff untuk mencari solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara Dilihat dari performa kerja di kantor BPKD gowa dengan adanya perencanaan yang dilakukan pengorganisasian, pelaksanaan dan pegawasan sudah di katakana efektif dan dari wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti membuktikan bahwa kantor BPKD gowa telah menerapkan ke empat fungsi manajemena keuangan dengan baik, dan mampu mengelolah keuangan nya dengan efektif. Diperkuat dengan adanya pemberian WTP yaitu pencapaian yang berhasil meraih opini wajar tampa pegecualian WTP akhir kinerja keuangan. dan dengan adanya beberapa kendala dalam proses pengawasan tapi dapat diselesaikan dengan cara evaluasi dan selalu mengikuti pelatihan.

Berdasarkan wawancara itu pula menunjukkan fungsi dari pengawasan keuangan daerah merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Adapun fungsi pengawasan keuangan di Kabupaten Gowa yaitu mengawasi seluruh regulasi yang dikeluarkan apakah telah dijalankan sesuai aturan. Pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ada pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal Kabupaten Gowa

selaku Inspektorat bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dari hasil kegiatan. BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan selaku pengguna anggaran di semua SKPD. BPKD melakukan pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dengan adanya pelatihan khusus, diskusi, sosialisasi, rapat kerja, dan evaluasi yang dilakukan, kantor BPKD Gowa telah berhasil meningkatkan kompetensi pegawai, memperbaiki pengelolaan keuangan, dan mengatasi kendala yang muncul. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas dengan efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

5) Realisasi Anggaran

a. Rasio Efektifitas

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas pendapatan sebagai berikut:

1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2) Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3) Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4) Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5) Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka

pendapatan dikatakan tidak efektif.

$$rasio\ efektifitas = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}}\ X\ 100\%$$

$$Tahun\ 2021 = \frac{1.876.590.013.141{,}48}{1.855.081.611.081{,}36}\ X\ 100\% = 101{,}16$$

$$Tahun\ 2022 = \frac{1.780.968.775.257{,}69}{1.760.456.992.472{,}00}\ X\ 100\% = 101{,}17$$

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran BPKD Gowa

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria Efektif
2021	**Pendapatan**	1.855.081.611.018,36	1.876.590.013.141,48	101%
	Pendapatan asli Daerah (PAD)	236.598.766.548,36	260.885.833.358,48	110%
	Pendapatan transfer	1.506.990.886.470,00	1.504.212.221.783,00	99%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	111.491.958.000,00	111.491.958.000,00	100%
2022	**Pendapatan**	1.760.456.992.472.00	1.780.968.775.257,69	101%
	Pendapatan asli Daerah (PAD)	250.890.698.571,00	265.326.827.151,69	105%
	Pendapatan transfer	1.496.976.493.901,00	1.503.052.148.106,00	100%
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100%

Sumber: LRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa 2021-2022 Diolah, 2024

Hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2021, Anggaran Pendapatan asli Daerah sebesar Rp 236.598.766.548,36 dan Realisasi Pendapatan asli daerah sebesar Rp.

260.885.833.358,48 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak. 110,27% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 110% dikategorikan sangat efektif. Dan anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 1.506.990.886.470,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.504.212.221.783,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 99,82% dengan demikian dieroleh rasio efektifitas sebanyak 99% dikategorikan cukup efektif. Sedangkan anggaran Lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 111.491.958.000,00 dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 111.491.958.000,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 100,00% dengan demikian dieroleh rasio efektifitas sebanyak 100% dikategorikan efektif.

Hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2022, Anggaran Pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 250.890.698.571,00 dan Realisasi Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 265.326.827.151,69 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 105,75% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 105% dikategorikan sangat efektif. Dan anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 1.496.976.493.901,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.503.052.148.106,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 100,41% dengan demikian dieroleh rasio efektifitas sebesar 100% dikategorikan efektif. Sedangkan anggaran Lain- lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.589.800.000,00 dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.589.800.000,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 100,00% dengan demikian dieroleh rasio efektifitas sebesar 100% dikategorikan efektif.

Hal ini tentunya dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan sesuai pilar - pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Hal ini tentu dapat dipahami karena sejauhmana penyelenggaraan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah menurut prakarsa dan aspirasinya sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.

kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah telah berusaha sekuat tenaga untuk menerapkan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, pengawasan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan terwujud apabila dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggunjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber

daya ekonomi, yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama datu periode pelaporan.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan semua program dan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini juga memuat Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Dacrah dan Pembiayaan, serta Neraca yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diawasi secara ketat sesuai dengan undang-undang.

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data , pencatatan , pengikhtisaran , sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai entitas pelaporan, maka pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan , realisasi anggaran , arus kas , dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya . LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan, yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran,
2) Laporan Perubahan.

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Data dari hasil penelitian dipaparkan, langka selanjutnya yang perlu dilakukan dalam membahas hasil dari temuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni fungsi- fungsi manajemen keuangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Abupaten Gowa. Dalam pengelolaan analisis data penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang nantinya akan menjadi pedoman dasar dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kaupaten Gowa

   manajemen merupakan proses mengkoordinasikan kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien. BPKD Gowa secara perlahan dan bertahap mulai menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan keuanganya.

   1) Fungsi perencanaan

      Fungsi awal dari sebuah aktivitas manajemen guna mencapai sebuah tujuan organisasi ataupun perusahaan adalah fungsi perencanaan sebab tanpa adanya perencanaan yang mahal tersebut organisasi maupun perusahaan tidak akan berjalan dengan baik (Mu'minah 2019).

Dalam pengelolaan keuangan badan pengelolaan keuangan agar terus berjalan tentu saja adalah dengan mengelola keuangan dengan baik dan tepat guna oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang telah dijelaskan pada landasan teori bahwa fungsi manajemen merupakan langkah terpenting dan paling vital karena perencanaan menjadi tolak ukur bagaimana organisasi ataupun lembaga itu akan berjalan. Perlunya perencanaan keuangan untuk menjalankan organisasi ataupun lembaga adalah keharusan keuangan harus selalu tercukupi dan menghasilkan laba serta harus cukup untuk membiayai kegiatan operasional lembaga ataupun organisasi selain itu keuangan yang cukup maka pengelolaan keuangan di daerah akan berjalan dengan baik (Penyelenggaraan et al. n.d.).

Perencanaan di kantor BPKD Gowa secara umum telah berjalan dengan baik, seperti perencanaan pengelolaan keuangan hingga penyaluran dana dan perencanaan masa depan. Hal ini sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sub bagian umum dan staf sub bagian, perencanaan dan pelaporan mengungkapkan bahwa.

Kantor BPKD Gowa telah melakukan perencanaan yang efektif dalam bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dasar Pelaksanaan Anggaran). Mereka menggunakan sistem komputerisasi untuk mengolah transaksi keuangan, mempermudah pelaporan, dan meningkatkan pengelolaan data keuangan pemerintah. Dalam hal anggaran, terdapat tiga laporan yang dihasilkan dari sistem Simda Keuangan, yaitu RKA, DPA, dan SPD. RKA merupakan laporan yang berisi rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan DPA

memuat dasar pelaksanaan anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, laporan penatausahaan juga dihasilkan, seperti SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), STS (Surat Tanda Setoran), dan surat pengendalian. Laporan-laporan ini membantu dalam mengontrol dan mengawasi pengelolaan keuangan.

Penerapan fungsi manajemen keuangan yang sesuai dengan RKA dan DPA telah berhasil dilakukan oleh kantor BPKD Gowa. Hal ini terbukti dengan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diterima setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa telah efektif dan terpercaya. Dengan adanya sistem komputerisasi yang handal dan standar manajemen keuangan yang efektif, kantor BPKD Gowa telah berhasil meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai internal auditor dan sebagai pengemban amanat pembina penyelenggara

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 mengembangkan SIMDA dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tujuan dari penerapan SIMDA ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Gowa sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sejak tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan sistem manual Microsoft Excel.

2) Fungsi Pengorganisasian

Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan, artinya tugas pimpinan untuk mengorganisasikan bagian satu dengan Bagian yang lain untuk mencapai tujuan adalah mengorganisasikan mereka (Tambat, Merauke, and Pada 2016).

Berhasilnya organisasi atau lembaga tidak terlepas dari faktor tenaga kerja pengorganisasian yang dilakukan untuk menentukan tugas apa yang dikerjakan siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab (Iv et al. n.d.).

Kantor BPKD Gowa telah mengadakan pelatihan khusus atau Diklat SIMDA yang diselenggarakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman pegawai dalam menggunakan sistem SIMDA untuk pengelolaan keuangan.

Setiap tahun, kantor BPKD Gowa juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait pengelolaan keuangan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menerapkan prosedur yang benar dalam pengelolaan keuangan. Meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan, penerapan fungsi pengeorganisasian di kantor BPKD Gowa telah efektif. Kendala tersebut dapat diatasi melalui rapat kerja yang rutin dilakukan untuk membahas masalah dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan terus ditingkatkan.

Dengan adanya pelatihan khusus, diskusi, sosialisasi, rapat kerja, dan evaluasi yang dilakukan, kantor BPKD Gowa telah berhasil meningkatkan kompetensi pegawai, memperbaiki pengelolaan keuangan, dan mengatasi kendala yang muncul. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas dengan efektif dan efisien serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

3) Fungsi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dari segi pelaksanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan

melanjutkan pekerjaan yang ditetapkan oleh unsur prencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan. *Actualing* adalah menggerakkan dan memberi perintah kepada seluruh bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan organisasi karena juga merupakan inti dari manajemen. Jika tidak ada pergerakan, rencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada energy pendorong untuk melakukan tugas dan bekerja sama (Mu'minah 2019).

pelaksanaan keuangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana lembaga dan mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Pengendalian merupakan suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan-kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pengendalian merupakan tahap akhir dari pengelolaan keuangan sehingga dengan adanya perencanaan yang mendesain perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, pencatatan yang dilakukan untuk mencatat seluruh keluar- masuk kas lembaga, pelaporan melaporkan hasil perhitungan laporan labarugi dan laporan arus kas. Pengendalian yang dilakukan oleh BPKD Gowa adalah pengukuran dan perbaikan mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang dibuat BPKD Gowa.

kantor BPKD Gowa, Dari pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan sangat baik dan tepat waktu. Setiap transaksi yang terjadi secara otomatis dikategorikan sesuai dengan jenisnya oleh sistem yang telah diterapkan. Hal ini memudahkan dalam pengelompokan dan analisis data keuangan. Selain itu, penerapan fungsi pelaksanaan di kantor BPKD Gowa juga terbukti efektif. Setiap uang yang masuk dan

keluar dicatat dengan teliti dan akurat. Seluruh proses pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Dengan demikian, kantor BPKD Gowa dapat dipercaya dalam mengelola keuangan dengan baik dan transparan.

4) Fungsi pengawasan

Fungsi dari pengawasan keuangan daerah merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keuangan daerah (Tambat, Merauke, and Pada 2016). Adapun fungsi pengawasan keuangan di Kabupaten Gowa yaitu mengawasi seluruh regulasi yang dikeluarkan apakah telah dijalankan sesuai aturan. Pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ada pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal Kabupaten Gowa selaku Inspektorat bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dari hasil kegiatan. BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan selaku pengguna anggaran di semua SKPD. BPKD melakukan pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi.

Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana

dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

Meskipun pelaksanaan kegiatan ini dapat dipandang cukup berhasil, namun pada pelaksanaannya ditemui beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat yang dipaparkan dengan tujuan jika akan dilaksanakan kegiatan serupa maka faktor-faktor ini dapat diminimalisir atau bahkan dicegah. Faktor-faktor tersebut Penghambat di antaranya; (1) Minimnya jumlah Sumber Daya Manusia di BPKD Gowa yang memiliki kemampuan dalam analisis laporan keuangan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan berupa SIMDA. Sehingga dalam pengelolaan keuangan di butuhkan waktu yang cukup lama karna perlu memberikan arahan kepada SDM yang kurang paham.

kantor BPKD Gowa, terdapat pengawasan yang baik terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini memastikan bahwa setiap kendala dan masalah yang muncul selalu ditangani dengan baik. Untuk mengatasi masalah tersebut, rapat kerja rutin dilakukan untuk membahas dan mencari solusi terbaik. Selain itu, kantor BPKD Gowa juga melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja. Dalam rangka peningkatan, staff dikirim untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan

pengetahuan mereka. Dengan adanya pengawasan yang baik dan upaya peningkatan melalui rapat kerja dan pelatihan, kantor BPKD Gowa dapat mengatasi setiap kendala dan masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan dengan efektif dan efisien.

5) Tata kelola keuangan Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Memiliki sistem pengelolaan yang baik dan efektif merupakan cita-cita seluruh pemerintah daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup visi, misi, dan tujuan sasaran kebijakan serta strategi pencapaian sasaran. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah:

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas baik sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber dana yang tersedia. Sumber Daya Manusia menjadi penting untuk diperhatikan karena subjek dari penyusunan laporan keuangan adalah setiap orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang tersebut. Yang mana, orang merupakan subjek hukum yang memiliki akal dan tugas untuk melaksanakan suatu kewajiban. Oleh karena itu pencerdasan SDM menjadi hal penting dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

b. Optimalisasi pemahaman tupoksi, pengawasan dan pengendalian internal serta optimalisasi koordinasi antar inter bidan dan tim-tim yang dibentuk dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi setiap sub bagian instansi terdapat perbedaan, seperti contoh di Kantor BPKD Kabupaten Gowa terdapat sub bagian Kepegawaian, pasti tugas pokok dan fungsinya dengan sub bagian Verifikasi dan Pembukuan. Artinya, meskipun berada pada instansi yang sama, optimalisasi pemahaman tugas pokok dan fungsi harus diperhatikan supaya tidak terjadi tumpang tindih tupoksi sehingga menyebabkan kinerja menjadi terhambat. Serta perlu adanya kerjasama pada masing-masing instansi, terutama OPD yang berperan melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, supaya terjadi keselarasan dalam menyelesaikan kewajiban.
c. Sosialisasi kepada Para Wajib Pajak/Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak dan restribusi agar dapat menjawab tantangan pencapaian target dan peningkatan pendapatan. Selain peran dari instansi pemerintah, peran masyarakat juga penting, karena masyarakat merupkan Warga Negara yang perlu untuk dipenuhi haknya, namun selain itu masyarakat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berupa pembayaran pajak yang harus dibayarkan tepat pada waktunya, supaya tidak terjadi kerugian pada daerah tersebut.
d. Melakukan koordinasi secara intensif kepada OPD untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan penatausahaan

pendapatan, dan pengelolaan keuangan daerah. Merupakan tugas utama dari BPKD dan Inspektorat selaku pengawas dari masing-masing OPD, agar terjalin hubungan yang komunikatif supaya dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak terjadi kegagalan dalam komunikasi.

e. Penggalian pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan potensi yang masih cukup besar dan kondisi ekonomi yang cukup kondusif. Merupakan tugas utama dari Bupati untuk dapat mengelola aset daerah terutama wisata alam untuk meningkatkan sektor ekonomi didaerah tersebut, untuk meningkatkan pendapatan daerah.
f. Optimalisasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam pengelolaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. Akuntansi akrual merupakan metode pencatatan akuntansi yang mana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk mencapai akuntabilitas publik. Akuntansi pemerintah daerah digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi dilingkungan Pemerintahan daerah.

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam menganalisis fungsi perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organizing)*, pengarahan (*directing)*, serta pengendalian dan pengawasan *(controlling)* yang berpengaruh terhadap Pengelolaan keuangan suatu organisasi. Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian Elyang 2019 berjudul Analisis Perencanaan Dan

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul - Sel Tahun 2016 – 2017 dan hasilnya menyebutkan bahwa Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data perencanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang efisien di tahun 2016 sampai dengan 2017 , yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh (George. R. Terry dan Leslie (2014) 2019), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Donasi Umat Pada Yayasan Posko Yatim Indonesia. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa Hasil dari penelitian ini, yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyaluran donasi umat pada Yayasan Posko Yatim Indonesia: Penerapan fungsi perencanaan sudah terprogram dengan baik.Tetapi hal berbeda yang disampaikan oleh (Mu'minah 2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus Pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang) Dari hasil penelitian membuktikan bahwa analisis data menunjukkan bahwa Usaha Mikro Omah Kripik Mbote sudah menerapkan Pengelolaan keuangan namun masih belum efektif dalam menerapkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Dalam segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan rasio efektivitas, kantor BPKD Gowa telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Mereka telah melakukan perencanaan yang efektif melalui Rencana Kerja Anggaran yang dimaksud termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang membantu dalam mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan baik.
2. Dalam hal pengorganisasian, kantor BPKD Gowa telah berhasil mengimplementasikan fungsi manajemen keuangan dengan baik. Mereka menggunakan sistem komputerisasi untuk mengelompokkan transaksi keuangan secara otomatis, mempermudah pelaporan, dan meningkatkan pengelolaan data keuangan pemerintah.
3. Pelaksanaan yang baik juga menjadi salah satu kekuatan kantor BPKD Gowa. Mereka melakukan rapat kerja rutin untuk membahas masalah dan mencari solusi yang tepat.
4. Pengawasan, Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi kendala yang muncul. Pelatihan khusus dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan.
5. Dalam hal rasio efektivitas, kantor BPKD Gowa telah mencapai hasil yang

memuaskan. Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa telah berjalan dengan baik dan efisien dibuktikan dengan hasil data dari tahun 2021 sebesar 101% dan pada tahun 2022 101% serta di dukung dengan Penghargaan WTP yang diterima setiap tahun juga menjadi bukti keberhasilan dalam pengelolaan keuangan.

Secara keseluruhan, kantor BPKD Gowa telah berhasil dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan mencapai rasio efektivitas yang baik. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola keuangan pemerintah dengan transparansi, akurasi, dan efisiensi yang tinggi. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah: Otonomi daerah dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia, baiknya Pimpinan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa dapat lebih mengatur penerimaan daerah agar bisa menyesuaikan dengan pengeluaran rutin sehingga pengelolaan keuangan daerah BPKD Gowa bisa diatur dan lebih efisien. Diupayakan peningkatan pertumbuhan badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) khususnya penerimaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat menampung pengeluaran daerah demi berbagai kebutuhan rill masyarakat sesuai dengan aspirasinya Agar tingkat efektivitas terus dipertahankan seperti saat ini yaitu sangat efektif. Dan disarankan kepada pembaca lain atau peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

Ainun, Mutia. 2021. "Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah Dari Sudut Pandang Kepemerintahan Yang Baik." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi JPENSI* 6(2): 143.

Amalia, Nur. 2018. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SDN 30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep." *Manajemen* 2: 78. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7399/1/Nur Amalia.pdf.

Dewi Mahmuda. 2019. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 2(2): 82–94.

Dinas, Pada et al. 2016. "Measurement Efficiency And Effectiveness Regional Financial Management In Dinas." 4(1): 613–22.

Firmansyah, Firmansyah, and Aulia Aulia. 2020. "Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4(1): 1–12.

George. R. Terry dan Leslie (2014). 2019. "Yayasan Posko Yatim Indonesia Muhammad Irzal Salam Program Studi Manajemen." *Analisis Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Penyaluran Donasi Umat Pada Yayasan Posko Yatim Indonesia Skripsi*.

Ilmu, Fakultas et al. 2015. "Fungsi Manajemen Pengelolaan Perpustakaan Umum Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang."

Indriakati, Andi Jenni, and Muh Sahrul. 2022. "Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabuptaen Soppeng." 5: 129–36.

Iv, B A B et al. "Dan Dae Rah Dalam Pe Mbangu Nan de Sa Se Rta Pe Ningkatan Pe Nye Diaan Air Minu m Dan." : 55–71.

Mallolongeng. Fitrah, Nasrullah, Sidjara. Sahlan, Lukman. Faturachman, Janide. Anugrah. 2022. "Praktek Kerja Lapangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Dengan Kreativitas Dan Solusi Matematis." 01(September 2022): 29–33.

Masalah, A Latar Belakang. 2010. "H. Malayu Hasibuan, Manajemen Dasar,Pengertian, Dan Masalah, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2010), h . 4. 2 1." : 1–12.

Mu'minah, Himmah. 2019. "Pengelolaan Keuangan: Studi Kasus Pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang." : 126. http://etheses.uin-malang.ac.id/15509/1/15510110.pdf.

"No Title." 2023.

"Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd

) Prov . Sul - Sel Tahun 2016 – 2017 Skripsi Oleh Elyang.” 2019.

Penyelenggaraan, Latar Belakang et al. “BAB I PENDAHULUAN.”

Radjak, Lukfiah Irwan, and Arita Taidi. 2022. “Analisis Pengelolaan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Di Puskesmas Tolangohula Abstrak :” *Journal Syariah and Accounting Public* 5(2): 103–11.

Saharuddin, Saharuddin, I Ketut Patra, and Sanaria Sanaria. 2019. “Analisis Fungsi – Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mandala Multi Finance Kabupaten Luwu Utara.” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 7(1): 1–7.

Sistem, Penerapan et al. 2017. “Uin Alauddin Makassar 2017.”

Tambat, Kampung, Kabupaten Merauke, and Fungsi-fungsi Manajemen Pada. 2016. “No Title.” (2): 135–55.

Terry, George R. 2021. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

DATA DAN KODING TRANSKRIP WAWANCARA

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Staff Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, Staff Sub Bagian Akuntansi/Keuangan

Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

No.	Nama	Jabatan
1.	H. ABDUK KARIM DANIA SE,.M.M	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
2.	ISMAIL,SE,MM	Kepala Sub-bagian umum dan kepegawaian
3.	Hasnawati SE,MM	Staff Sub-bagian perencanaan dan pengelolaan
4.	Andryani hasan SE,MM	Staff Sub-bagian keuangan/akuntansi

Draft Wawancara (Kepala BPKD Gowa)

1. Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pelaporan, bagaimana tahap perencanaannya dan dengan adanya perencanaan anggaran ini apakah pengelolaan keuangan di kantor BPKD gua sudah efektif ?
2. Bagaimana cara bapak mengatur agar penyaluran dana tepat waktu dan dari segi pelaporan keuangan juga tepat waktu ?
3. Bagaimana pembagian tugas dalam bagian pengelolaan keuangan ini apakah sudah sesuai dengan bidanya masing-masing
4. Dana BPKD Gowa di terima dari mana dan apakah dana setiap tahunya di terima tepat waktu dan juga disalurkan tepat sesuai waktunya ?

5. Dari segi pengawasan apa yang biasanya di lakukan oleh pimpinan BPKD Gowa untuk kelancaran proses pengelolaan keuangan agar dari pengelolaan keuangan di BPKD Gowa dikatakan efektif
6. Apakah benar BPKD Gowa telah menerima WTP setiap tahun?
7. Siapa saja yang bertugas untuk mengawasi proses pengelolaan keuangan, pengawasan seperti apa yang dilakukan?
8. Kendala apa yang biasanya muncul dan bagaimana cara menanganinya
9. Cara menjaga hubungan di antara staff dan pegawai di kantor BPKD Gowa seperti apa
10. Apakah kantor BPKD menerapkan transparansi dari segi Laporan keuangan nya kepada masyarakat
11. Apakah ada peraturan tertentu yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa untuk mendapatkan hasil yang baik dan efektif.
12. Untuk mempertahankan WTP yang diterima setiap tahun apakah ada strategi tersendiri yang dilakukan pimpinan dan pegawai di kantor BPKD Gowa ?
13. Selain WTP yang di raih apa yang menjadi tolak ukur dikatakanya bahwa kantor BPKD Gowa ini sudah efektif dari segi perencanaan pelaporan pengorganisasian palaksanaan dan pengawasan ?
14. Apakah pengendalian keuangan dilakukan di kantor BPkD Gowa, seperti apa pengendalian yang dilakukan ?

(Ibu Hasnawati Selaku Staff Bagian Perencanaan Dan Pelaporan)

Planning

1. Bagaimana proses pengelolaan keuangan selama ini?
2. Apakah perencanaan keuangan penting sebelum melakukan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan?
3. Apa proses perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pelaporan ? Bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten gowa?
4. Apakah ada perencanaan tentang penyaluran dana agar penyampaian dana tepat waktu? Bagaimana hal ini ditetapkan?
5. Anggaran apa saja yang dibuat dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah?
6. Apakah ada metode khusus untuk melakukan proses pencatatan keuangan pada kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana penerapannya?

(pak ismail selaku kepala bagian umum dan kepegawaian)

Organizing

1. Bagaimana pembagian tugas dalam bagian pengelolaan keuangan ini, apakah sudah sesuai dengan bidan nya masing-masing?
2. Apakah kantor BPKD Kabupaten Gowa membuat peramalan kebutuhan finansial dan juga anggaran? Siapakah yang melakukan peramalan tersebut? Bagaimana melakukan peramalan ini?
3. Bagaimana cara mengatur agar penyaluran dana tepat waktu?
4. Sumber-sumber dana apa saja yang diperhitungkan dan biasanya

digunakan?

5. Bagaimana cara memastikan kelancaran kas?

Actuating

1. Apakah bagian keuangan mengetahui tujuan lembaga kantor BPKD Kabupaten Gowa? Dari mana mengetahui tujuan ini?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ?
3. Apakah ada dorongan tertentu yang diberikan kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana bentuknya?
4. Apakah ada pengarahan tertentu dari pimpinan berkaitan dengan tujuan lembaga kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan?
5. Bagaimana membina hubungan antar pegawai secara individual maupun antar bagian dalam kantor BPKD Kabupaten Gowa?

Controlling

1. Rasio keuangan apa saja yang biasanya paling sering Anda lihat untuk melihat performa keuangan?
2. Bagaimana kontrol finansial yang digunakan untuk melihat kinerja kantor BPKD Kabupaten Gowa?
3. Seberapa seringkah lembaga mengevaluasi hasil kerja pengelolaan keuangan dalam kantor BPKD Kabupaten Gowa?
4. Apakah ada kendala dalam bagian pengelolaan keuangan ini?
5. Strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan?
6. Apakah ada factor yang menghambat dalam melakukan evaluasi hasil kerja

pengelolaan keuangan ? apa saja factor yang menhambat itu ?

(Ibu indryani hasan selaku staff bagian keuangan/akuntansi)

1. Nama informan dan jabatan di kantor BPKD Gowa ?
2. Bagaimana caranya megelola keuangan daerah? bagaimana proses pengelolaanya?
3. Apakah dana yang diterima BPKD Gowa setap tahun diterima dan disalurkan tepat waktu? bukti berupa dokumen atau buku laporan.
4. Dari mana saja sumber Keuangan/ dana Daerah?
5. Apakah ada buku laporan penyaluran dana dan kemana saja dana disalurkan ?
6. Apakah ada peraturan tertentu terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa?
7. Bagaimana proses pencatatan terhadap anggaran yang di keluarkan, dan apakah ada aplikasi khusus yang digunakan untuk memudahkan pencatatan anggaran ? Dan siapa yang mencatat itu?
8. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Gowa dan apa bentuk laporan yang disampaikan?
9. Ada berapa SKPD di kabupaten gowa yang melaporkan laporan keuanganya kepada BPKD Gowa ?
10. Apakah SKPD di kab gowa semuanya tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuanganya kepada BPKD Gowa ?
11. Jika ada SKPD yang pernah lambat menyampaikan Realisasi anggaran atau laporan keuanganya, ada berapa SKPD yang lambat menyampaikan laporan keuanganya ? / ditahun berapa ada keterlambatan penyampaian

laporan keuangan/ anggaran ?

12. Kapan jadwal pengumpulan laporan keuangan setiap tahunya, apakah ada buku laporan yang mencatat tanggal pengumpulan dan batas pengumpulan laporan keuangan di BPKD Gowa ?
13. Apa yang menjadi penyebab biasanya terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan/ apa kendalanya ?
14. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa?
15. Dalam pengelolaan keuangan daerah, apa masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran Daerah Di Kabupaten Gowa?
16. berapa dana yang diterima kantor BPKD setiap tahun?
17. Apakah dana daerah yang diperoleh setiap tahunya berubah?
18. Bagaimana bentuk pengelolaan dana keuangan daerah apakah sudah efektif dan efisien?
19. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa penyampaian laporan keuangan di kantor BPKD Gowa dikatakan sudah efektif ?
20. Bagaimana keterlibatan msyarakat dalam pengelolaan dana daerah?
21. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana daerah di BPKD Gowa?

Lampiran 2 Hasil Wawancara

DATA DAN KODING TRANSKRIP WAWANCARA

1. *Coding* Indikator

   I : Berkomunikasi dengan pendengar

   I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar

2. *Coding Key Informan*

   Wawancara *Key Informan* 1

   Nama : H. Abduk Karim Dania SE,.M.M

   Kode : AK

   Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

   Wawancara *Informan*

   Nama : Pak ismail SE,M.M

   Kode : IS

   Jabatan : Kepala bagian umum dan kepegawaian

   Wawancara *Informan*

   Nama : Ibu hasnawati, SE,.M.M

   Kode : HW

   Jabatan : Sub bagian perencanaan

   Wawancara *Key Informan* 1

   Nama : Andryani hasan SE,.MM

   Kode : AH

   Jabatan : Sub bagian perencanaan dan pelaporan

Wawancara dengan Bapak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

Hasil wawancara

1. Proses perencanaan itu setiap tahunnya dimulai dari musrembang desa Kecamatan Kabupaten sampai forum SKPD itulah dasarnya untuk membuat namanya rkpd sebagai dasar untuk menyusun APBD menyusun KUA PPAS Selanjutnya APBD Ditetapkan dasar dari rkpd selanjutnya APBD dievaluasi di provinsi terus disahkan dari Bupati lalu dilaksanakan **(I Baris 5)**
2. Penyaluran dana setiap tahunnya itu tepat waktu itu semua sudah ada tupoksinya sudah ada di Perda (peraturan daerah) perup(peraturan bupati) tentang pengelolaan keuangan daerah **(I Baris 7)**
3. terkait dengan Bagaimana menyusun APBD diusahakan terus mengakuntansikan dan melaporkan ke BPK untuk di audit
4. tentu ini Semua sudah dijabarkan di tupoksi khususnya di bpkd terbagi dari 4 bidang satu sekretaris ada bidang akuntansi aset anggaran dan perbendaharaan dan kesekretariat itu semua dibagi tugas-tugasnya dan alhamdulillah dan selama ini pengelolaan keuangan bpkd kita sudah 11 tahun WTP.
5. tentu semua APBD itu sumbernya dari pusat dan pad kalau PAD itu di cari sendiri melalui SKPD teknis kalau dari pusat itu dari transfer, transfernya itu sesuai dengan mekanisme dan regulasinya , sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh kementrian keuangan itu semua kita ikuti teknisnya
6. dari segi pengawasan disamping kita melakukan pengawasan ketua bidang tentu juga ini tidak lepas dari pengawasan ekspaktorat dan setiap tahunya kita itu diawasi oleh BPK dilakukan audit

7. kita sudah 11 kali mendapat opini WTP sudah 11 tahun kita WTP itu yang saya bilang tadi pengawasan itu tentu dilakjukan oleh Kepala SKPD Dan saya selaku kepala BPKD akan melakukan penguasaan secara berjenjang selanjutnya tentu secara berjenjang itu ke sekretaris dan kepala bidang dan selanjutnya kepada sekretaris dan bidang itu melakukan evaluasi secara berjenjang ke bawah **(I Baris 27)**
8. kendalanya itu tentu setiap tahun pengolahan keuangan itu semakin Kompleks tentu kita harus siap untuk melakukan penyesuaian tetapi kita harus tetap belajar karena peraturan itu setiap tahun selalu mengalami perubahan-perubahan penyesuai tentu mengarah lebih bagus.
9. Kita di kantor BPKD itu semua satu tim kalau ada yang dikerja kita harus bekerja bareng-bareng kalau ada yang harus diselesaikan harus disesuaikan dan itu semua sesuai dengan tupoksi masing-masing Tapi itu semua harus bergerak secara tim harus sama-sama menyelesaikan masalah biar masalah itu cepat selesai
10. Iya pasti semuanya transparansi karena itu tuntutan zaman sekarang, transparansi mulai dari prposes perencanaan sampai pelaporan.
11. aturan tertentu itu tidak ada secara spesifik semuanya itu yang namanya pengelolaan keuangan itu Aturannya sudah jelas baik itu undang-undang peraturan pemerintah peraturan mentri keuangan sekaligus peraturan daerah yang kita dibuat sendiri dan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah itu acuanya dari uu permendagri dan peraturan mentri keuangan
12. Secara umum gambarannya WTP, WTP itu suatu opini Bagaimana pengelolaan keuangan yang baik, WTP itu merupakan gambaran dari seluruh mekanisme dan prosedur yang ada kita sudah ikuti sesuai dengan

aturan yang mengaturnya khususnya Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

13. Pengendalian itu tadi sudah digariskan oleh aturan kapan kita harus melakukan penyusunan APBD, kapan kita harus melakukan sosahlisasi terhadap Bagaimana pengelolaan keuangan yang bagus dan tepat waktu kapan kita akan melakukan perubahan Kapan kita akan melakukan bukti-buku itu sudah diatur dan itu yang kita ikuti tidak boleh tifdak, kapan kita vtidak ikuti itu maka WTP itu tidak mungkin kita bisa capai. **(I Baris 55)**

Wawancara dengan ibu hasnawati di sub bagian perencanaan dan pelaporan.

N : Baik ibu terimakasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara baik ibu apa bisa saya mulai wawancaranya sebelumnya ibu bisa di perkenalkan nama title dan ibu bertugas dibagian apa.

HS : iya dek saya hasnawati SE,MM di sub bagian perencanaan dan pelaporan di kantor BPKD Gowa

N : baik ibu langsun saja Bagaimana proses perencanaan yang dilakukan sebelum melakukan pelaporan, Bagaimana tahap perencanaannya ?

HS : perencanaan yang dibuat oleh BPKD Gowa setiap tahunya adalah perencanaan keuangan, proses perencanaanya yang pertama yaitu melakukan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) menyangkut dari semua bidang diminta untuk memasukkan rencana anggaran nya karna disetiap bidang punya rencana kegiatanya masing-masing yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk Jangka Waktu 5 Tahun, Serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek Atau Rencanan Tahunan Yang Dikenal Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga

daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan lalu disusun menjadi rencana kerja anggaran (RKA) dari RKA tadi setelah disetuji oleh PERDA DPR semua tahapan penggaranya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanaan kegiatan atau pelaksanaan anggaran dari DPA ini menjadi dasar pencairan anggaran." **(I Baris 81)**

N: Bagaimana hal ini ditetapkan?

HS: Fungsi perencanaan sangat penting karna dengan perencanaan memudahkan program kerja yang akan dilakukan setiap kegiatan terutama dalam pengelolaan keuangan dan penyusanan anggaran di kantor BPKD gowa setiap tahunya, **(I-A Baris 87)** perencanaan yang dilakukan yaitu dimulai dari penyusunaan RKA yang telah disetujui lalu disusun menjadi DPA yang akan menjadi pedoman atau dokumen pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kantor BPKD Gowa setiap tahunya."

N: lalu dengan adanya perencanaan anggaran ini apakah pengelolaan keuangan di kantor BPKD Gowa sudah efektif ?

HS: "ya, sudah efektif karna setiap SKPD dalam pelaksanaan anggaranya telah menyesuaikan dengan DPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran" **(I Baris 95)**

N: metode apa yang digunakan dalam proses pencatatan keuangan seperti apa ?

HS: untuk melakukan pengimputan melalui system aplikasi yaitu SIPD penganggaran, dari tahapan perencanaan awalnya sebelum RKA di buat rendja dari rendja dasarnya untuk menyusun RKA apakah direncanakan di rendja nya itu

program kegiatanya sub kegiatanya itulah yang dimasukkan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu hasnawati SE,.MM di bagian sub perencanaan dan pelaporan tentang penerapan fungsi perencanaan manajemen keuangan di kantor BPKD Gowa sudah dilakukan dan terbilang cukup baik dilihat dari pelaksanaan pencatatan anggaran yang dilakukan sesuai dengan pedoman yaitu menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Pemaparan dari hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa perencanaan dalam memulai pengelolaan keuangan agar dalam pengelolaan keuangan bisa terarah dan berjalan dengan efektif.

Transkrip Wawancara Pak ismail Selaku kepala bagian umum dan kepegawaian

N: Baik pak terimakasih telah menyempatkan waktunya untuk bisa melakukan wawancara sebelumnya pak bisa di perkenalkan nama dan jabatan di kantor BPKD Gowa ?

IS: baik dik saya pak ismail kepala bagian umum dan kepegawaian di kantor BPKD Gowa

N: baik pak saya mulai wawancaranya, Bagaimana pembagian tugas dalam bagian pengelolaan keuangan ini, apakah sudah sesuai dengan bidan nya masing-masing?

IS : silahkan dek, untuk pembagian tugas sudah ditetapkan pada peraturan bupati dan diperaturan bupati itu sudah jelas tentang pembagian tugas dan pegawai tinggal menunggu penempatan saja setalah dilakuan pelantikan”

N : Apakah kantor BPKD Kabupaten Gowa membuat peramalan kebutuhan finansial dan juga anggaran? Bagaimana melakukan peramalan ini?

IS: peramalan yang dibuat dalam bentuk RKA setiap tahunya dengan itu

memprioritaskan kebutuhan apa yang harus dibuat dan dipenuhi tahun itu tetapi disesuakn dengan jumlah dana yang tersedia, dalam proses RKA itu dilakukan rapat internal semua bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidan yang ada dikabupaten gowa, kira-kira program kerjanya kedepanya apa dan disesuaikan dengan anggaran untuk kebutuhan program tersebut mengenai juga dengan kemampuan keuangan yang di berikan" **(I Baris 134)**

N: Bagaimana cara mengatur agar penyaluran dana tepat waktu?

IS : "Setiap tahun disusuna perencanaan anggaran setelah ditetapkan anggaran lalu menyusun anggaran kas, dengan penyusunan anggaran itu di jadikan pedoman untuk pelaksanaan penyusunan anggaran sehingga dalam penyusunan tersebut berjalan dengan baik dan dalam penyaluran dananya tepat waktu. Dalam penyusunanya disusun kira-kira kegiatan itu dilaksanakan bulan januari-desember dibuatkan skema, bulan berapa dilaksanakan supaya kegiatan kegiatan terjadwal"

N: Sumber-sumber dana apa saja yang diperhitungkan dan biasanya digunakan?

IS: sumber dana dari pajak yang dirangkum dalam APBD, APBN dana transfer dari pusat merupakan pembagian bagi hasil dari provinsi juga ada termasuk belanja hibah jadi dari situlah semua sumber dana yang digunakan"

N: Bagaimana cara memastikan kelancaran kas?

IS : "untuk kelancaran kas dikelola oleh sub bidang pengelolaan kas daerah yang mencatat berapa uang yang masuk dan uang yang keluar setiap hari jadi terdapat control dana anggaran daerah (DAD) yang masuk, berapa uang transfer yang masuk dari pusat termasuk belanja provinsi jadi sudah ada sub bagian yang mengelola dan mengatur kas untuk memastikan kelancaran proses pemerintahan daerah"

"dalam penyusunan pencatatan yang dilakukan diawali dari tahap pengumpulan

dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan setiapkejadian transaksi keluar-masuk.

Berdasarkan wawancara ersebut analisis oenelitian penerapan fungsi pengorganisasian dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif yaitu dilakukan dengan cara menyusun anggaran berpedoman pada RKA yang telah disusun sebelumnya dan untuk memastikan kelancara kas dilakukan pada sub bidan pengelolaan kas yang selalu mencatat uang yang masuk dan keluar dan dalam penyaluran dana setiap tahunya disalurkan sesuai dengan jadwal dilaksanakan bulan januari-desember dibuatkan skema, melalui rapat staf.

N: Apakah bagian secretariat mengetahui tujuan lembaga kantor BPKD Kabupaten Gowa? Dan apa tujuanya ?

IS : Ya, tujuanya yaitu lebih beriorintasi pada pelaksanaan belanja anggaran, dimana bappenda yang sebagian besar bertugas untuk mengumpulkan uang dan BPKD istilahnya membelanjakan uang jadi semua belanja keuangan sekabupaten gowa masuk permohonanya ke badan keuangan pembayaran jadi proses pencairanya masing-masing disesuaikan dengan kebutuhanya SKPD".

N: Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ? Apakah ada dorongan tertentu yang diberikan kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana bentuknya?

IS: "sejauh ini pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, adapun dorongan yang diberikan berupa penyediaan anggaran pembayaran lembur kepada pegawai yang bekerja diluar jam kerja" **(I Baris 174)**

N: Apakah ada pengarahan tertentu dari pimpinan berkaitan dengan tujuan lembaga kantor BPKD Kabupaten Gowa? Bagaimana pengarahan tersebut dilakukan?

IS: “ iya, selalu diadakan rapat evaluasi minimal satu kali dalam sebulan yaitu rapat staf disampaikan apa-apa progres yang harus diselesaikan setiap ada masalah maka dilakukan rapat staf untuk mendapatkan solusi” **(I-A Baris 179)**

N: Bagaimana membina hubungan antar pegawai secara individual maupun antar bagian dalam kantor BPKD Kabupaten Gowa?

IS: “salah satunya yaitu dengan mengadakaan rapat staf, melakukan kegiatan yang melibatkan pegawai termasuk keluarganya jika ada kesempatan yang luang” **(I-A Baris 184)**

Hasil wawancara dengan ketua sub bagian umum dan kepegawaian tentang penerapan fugsi pelaksanaan dalam mewudukan tata kelola keuangan yang efektif di kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten gowa dilakukan dengan melaukan evaluasi di setiap pelaksanaan pengelolaan keuanganya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman RKA yang telah dibuat, dan didapatkan pulan bahwa BPKD Gowa melakukan penjalinan hbungan dengan staf dengan melakukan kegiatan yag melibatkan seluruh staf dan keluarganya, dan dalam pelaksanaan pengelolaan jika dala pelaksanaanya terdapat kendalam maka dilakukan lah rapat staf untuk mencari solusinya.

N: bagaimana cara penerapan fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuagan di kantor BPKD Gowa ?

IS: “penerpan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah setiap kegiatan di kantor BPKD Gowa telah dilaukan maka dibuatkan laporan pertanggungjawabanya dan setiap bulanya laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) yang ada di kantor BPKD Gowa muat di website humas BPKD Gowa sehingga smua bisamelihat laporan tersebut secara transparan. ” **(I Baris 201)**

N: Bagaimana kontrol finansial yang digunakan untuk melihat kinerja kantor BPKD

Kabupaten Gowa?

IS: yaitu dengan melakukan rapat semua kegiatan dan yang sudah direalisasikan di tuangka dalam rapat jika ada kendala maka juga diselesaikan dalam ruang rapat jadi dilakukan kontrol sampai dimana pelaksanaan keuangan minimal ada namanya laporan perbulan''.

N: Seberapa seringkah lembaga mengevaluasi hasil kerja pengelolaan keuangan dalam kantor BPKD Kabupaten Gowa?

IS: "sebisa mungkin mengadakan rapat setiap ada waktu dan jika ada kendala yang dirasa perlu diselesaikan bersama paling tidak ada rapat internal antara pimpinan kepala badan seketaris dan kepala bidang" **(I Baris 212)**

N: Apakah ada kendala dalam bagian pengelolaan keuangan ini?

IS: "kendala yaitu sekarang masuk era ditigalisasi dimana dibutuhkanya SDM yang unggul yang muda, dilihat dari kantor BPKD gowa masih banyak SDM yang yang sudah berumur yang kurang mampu menggunakan atau mengelola aplikasi untuk pengelolaan keuangan, dan kendala lainya yaitu semua instansi membutuhkan biaya anggaran masih perlu tambahan anggaran untuk mengoptimalkan proses kinerja di kabupaten". **(I Baris 220)**

N: Strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan?

IS: " yaitu selalu evaluasi dan banyak belajar jika ada pelatihan mengirim staf untuk menyesuaikan perkembagan digitalisasi termasuk dengan peraturan terbaru setiap ada aturan baru diikuti dan dipelajari bersama seupaya tidak ketiggalan dengan yang lain". **(I Baris 224)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak ismail Dilihat dari performa kerja di kantor BPKD gowa dengan adanya perencanaan yang dilakukan

pengorganisasian, pelaksanaan dan pegawasan sudah di katakana efektif dan dari wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti membuktikan bahwa kator BPKD gowa telah menerapkan ke empat fungsi manajemena keuangan dengan baik, dan mampu mengelolah keuangan nya dengan efektif. Diperkuat dengan adanya penghargaan WTP yaitu pencapaian yang berhasil meraih opini wajar tampa pegecualian WTP akhir kinerja keuangan, dengan adanya beberapa kendala dalam proses pengawasan tapi dapat diselesaikan dengan cara evaluasi dan selalu mengikuti pelatihan. Berdasarkan wawancara itu pula menunjukkan fungsi dari pengawasan keuangan daerah merupakan fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Adapun fungsi pengawasan keuangan di Kabupaten Gowa yaitu mengawasi seluruh regulasi yang dikeluarkan apakah telah dijalankan sesuai aturan. Pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Gowa ada pengawas internal dan eksternal. Pengawas internal Kabupaten Gowa selaku Inspektorat bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dari hasil kegiatan. BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan selaku pengguna anggaran di semua SKPD. BPKD melakukan pengawasan secara mekanisme, secara prosedural sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Transkrip Wawancara Ibu Indryani Hasan Selaku Staff Bagian Keuangan/Akuntansi

Dari hasil wawancara diatas megenai ke empat fungsi manajemen keuangan diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap ibu andriani hasan SM,.MM sub bidan akuntansi analis keuangan pusat dan daerah dimana peneliti menanyakan mengenai,

N: terimakasih ibu telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara, sebelumnya bisa diperkenalkan nama dan dibagian mana ibu ?

AH: baik dek saya andriani hasan di sub bagian keuangan

N: baik ibu bisa dimulai wawancaranya, Bagaimana caranya megelola keuangan terutama dibagian pelaporan daerah ?

AH: " dimana pelaporan masih menggunakan aplikasi ekmis yag dari BPKP tapi untuk 2024 diwajibkan untuk menggunakan SIPD RI untuk proses penganggaranya dimana di aplikasi ekmis itu belum termasuk perencanaan belum termasuk didalamnya baru penatausahaan, penganggaran dan pelaporan di ekmis pengelolaan keuanganya." **(I Baris 268)**

N: Apakah dana yang diterima BPKD Gowa setap tahun diterima dan disalurkan tepat waktu ?

AH: " iya disalurkan tepat waktu, karna setiap tahunya diusahan penyaluran dana dan pelaporan itu tepat waktu karna tidak mau ada pemotongan dll, jadi ada aturan mengenai jadwal pelaporan mengenai berapa dana yang disalurkan dan kapang disalurkan serta batas waktu penyalurannya itu dirangkum semua dalam aplikasi dalam bentuk DAU dan laporan dana alokasi khusus DAK dimana jadwal akhir pelaporan kontraknya setiap tahun 21 juli sebagian dari dana yang turun dan jadwal setiap anggaran berbeda-beda dimana khusus DAK itu ada namanya DAK Fisik dan non fisik yang mana dak fisik itu harus ada yang namanya kontrak yang di upload pelaporan-pelapran tahun sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk dana bisa turun dan disalurkan, kalau dak non fisik itu tidak ada kontrak cuman di upload saja realisasi atau penggunaan tahun sebelumnya **(I-A Baris 280)**

N: Bagaiaman di tahun sebelumnya apakah penyaluran dananya juga tepat waktu."

AH: iya tepat waktu

N :Dari mana saja sumber Keuangan/ dana Daerah?

AH:"sumber dana dari DAU, DAK, dana transfer, dana bagi hasil, pajak,pendapatan lain-lain, hibah".

N: Apakah ada buku laporan penyaluran dana dan kemana saja dana disalurkan?

AH:"Disalurkan tergantug dari permintaan SKPD, yang dimana dana ini di bagi berdasrkan RAK yang telah dibuat"

N: Apakah ada peraturan tertentu terhadap pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa?

AH: "iya ada kebijakanya, misalkan masalah retribusi, pajak, semuanya diatur dalam kebijakan tersebut".

N: Bagaimana proses pencatatan terhadap anggaran yang di keluarkan, dan apakah ada aplikasi khusus yang digunakan untuk memudahkan pencatatan anggaran? Dan siapa yang mencatat itu?

AH: "menggunakan aplikasi ekmis dari BPKPRI tahun sebelumnya dinamakan simda tapi semua prodaknya dari BPKP dari simda dan 2 tahun ini dinamakan ekmis" 2021 kebawah dinamakan simda 2022-2023 ekmis yang mencatat anggaran yaitu semua bidan yang ada di BPKD Gowa seperti bidan anggaran ada penatausahaan, akuntansi, khusus dibidag aset menggunkan aplikasi simda bmd Khusus utuk pengelolaan barang milik daerah". **(I Baris 300)**

N: Bagaimana prosedur pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Gowa dan apa bentuk laporan yang disampaikan?

AH: "jadi akhir tahun itu diminta setiap SKPD setelah selesai semua transaksi yang

ada di tahun itu di desember kita sudah menyurat untuk permintaan pelaporan keuangan tahun sebelumnya untuk dilakukan konsulidasi menjadi laporan keuangan pemda".

N: Ada berapa SKPD di kabupaten gowa yang melaporkan laporan keuanganya kepada BPKD Gowa ?

AH: " ada 54 SKPD di tambah prusda"

N: Apakah SKPD di kab gowa semuanya tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuanganya kepada BPKD Gowa ?

AH: "ada yang tepat waktu ada juga yang tidak, tetapi seiring berjalanya keuangan pemda mereka juga menyelesaikan laporan keuangan SKPD nya, jadi diminta sampai akhir januari tahun yang akan datang paling lambat 31 januari tapi disurat yang dicantumkan 10 januari tapi biasanya ada yang molor sampai 31 januari tapi masih dikasi kebijaksanaan jika lambat tetapi tetap di catat di tanggal 10 januari "

N: Jika ada SKPD yang pernah lambat menyampaikan Realisasi anggaran atau laporan keuanganya, ada berapa SKPD yang lambat menyampaikan laporan keuanganya ? / ditahun berapa ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan/ anggaran ?

AH: " jadi SKPD yang biasanya lampat melaporkan keuanganya adalah SKPD besar seperti dinas pedidikan, dinas kesehatan,RSD, dinas PU, SEKDA jadi ada 5 yang biasanya lama". Jadi setiap tahun seperti itu untuk SKPD Besar".

N: Apa yang menjadi penyebab biasanya terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan/ apa kendalanya ?

AH: "biasanya karna SDM yang kurang, kesalahan teknis karna kan dipelaporan itu kita mengunkaan aplikasi jadi kadang ada masalah baru yang muncul yang sementara kita masih cari solusinya juga "

N: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran keuangan Daerah Di Kabupaten Gowa?

AH: “jadi laporan setiap bulanya tu dari SKPD setiap tanggal 10 bulan berikutnya ada namanya laporan pertanggungjawaban setiap bulan, terus ada laporan tahunanan, dan laporan dari BPKD itu sendiri dari BPKD itu sendiri tapi sekarang tiap bulan juga menyampaikan laporan realisasi anggaran ke provinsi”.

N: Dalam pengelolaan keuangan daerah, apa masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran Daerah Di Kabupaten Gowa?

AH: “ iya jadi ada web untuk diakses untuk laporan keuangan yang telah di audit oleh BPKD”

N: berapa dana realisasi anggaran yang ada di kantor BPKD setiap tahun terhitung dari tahun 2020 - 2022?

NO	TAHUN	REALISASI ANGGARAN
1	2021	1.876.590.013.141,48
2	2022	1.780.968.775.257,69

Sumber LRA BPKD Gowa 2021-2022 Diolah : 2024

N: Bagaimana bentuk pengelolaan dana keuangan daerah apakah sudah efektif dan efisien? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa penyampaian laporan keuangan di kantor BPKD Gowa dikatakan sudah efektif ?

AH: “iya sudah, karna terkait dengan aplikasi ini masalah pengelolaan keuangan begitu telah selesai mengimput pendukung yang dibutuhkan terus membuat jurnal penyesuaiaian di akhir tahun maka laporan itu akan selesai, dan jikapun ada masalah maka akan terus dilakukan evaluasi dan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga proses pelaporan di kantor BPKD Gowa selesai tepat waktu”. **(I Baris 349)**

N**:** Bagaimana keterlibatan msyarakat dalam pengelolaan dana daerah?

AH: “iya karna setiap dilakukan musrembang dibicarakan dan disuarakan bersama dengan masyarakat”

N**:** Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana daerah di BPKD Gowa?

AH: “jadi beda yah pengelolaan keuangan BPKD Gowa dengan pemda jadi ada khusus anggaran BPKD nya dengan khusus pemda nya, semua sub bagian di BPKD Gowa” ada 5 dengan sektetariat, jadi ada masing-masing bidang yang mengurus.

Dari analisis data transkrip wawancara dengan pak ismail, ibu hasnawati dan ibu inriani hasan peneliti dapat membuat sebuah rangkuman bahwa dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan inti-inti yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya inti-inti yang didapatkan tergolong kedalam proses pengelolaan manajemen apakah telah menerapkan ke empat fungsi manajemen dalam pegelolaanya untuk menciptakan tata kelola keuangan yang efektif.

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	perencanaan yang dibuat oleh BPKD Gowa setiap tahunya adalah perencanaan keuangan, proses perencanaanya yang pertama yaitu melakukan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) menyangkut dari semua bidang diminta untuk memasukkan rencana anggaran nya karna disetiap bidang punya rencana kegiatanya masing-masing yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk Jangka Waktu 5 Tahun, Serta Rencana Pembangunan Jangka Pendek Atau Rencanan Tahunan Yang	**8**	**Contoh Penulisan:** AK/I/1/5 **Cara Baca:** Pak Abdul Karim Berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 1 baris ke 5.

	Dikenal Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Disamping itu, di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga daerah juga mempunyai dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagai penjabaran RPJMD, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai rencana tahunan lalu disusun menjadi rencana kerja anggaran (RKA) dari RKA tadi setelah disetuji oleh PERDA DPR semua tahapan penggaranya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanaan kegiatan atau pelaksanaan anggaran dari DPA ini menjadi dasar pencairan anggaran.”		
I-A	Fungsi perencanaan sangat penting karna dengan perencanaan memudahkan program kerja yang akan dilakukan setiap kegiatan terutama dalam pengelolaan keuangan dan penyusanan anggaran di kantor BPKD gowa setiap tahunya,	**24**	**HS/I-A/1/24** **Cara Baca:** Ibu Hasnawati mempertimbangkan keinginan pendengar terdapat pada lampiran 1 baris ke 24.
I	“ya, sudah efektif karna setiap SKPD dalam pelaksanaan anggaranya telah menyesuaikan dengan DPA yang menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran” **(I Baris 32)**	**32**	**HS/I/1/32** **Cara Baca:** Ibu Hasnawati Berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 1 baris ke 8.
I	peramalan yang dibuat dalam bentuk RKA setiap tahunya dengan itu memprioritaskan kebutuhan apa yang harus dibuat dan dipenuhi tahun itu tetapi disesuakn dengan jumlah dana yang tersedia, dalam proses RKA itu dilakukan rapat internal semua bidang, kepala sub bagian dan kepala sub bidan yang ada dikabupaten gowa, kira-	**57**	**IS/I/2/57** **Cara Baca:** Pak Ismai lBerkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 2 baris ke 57 .

	kira program kerjanya kedepanya apa dan disesuaikan dengan anggaran untuk kebutuhan program tersebut mengenai juga dengan kemampuan keuangan yang di berikan" **(I Baris 57)**		
I	I: "sejauh ini pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, adapun dorongan yang diberikan berupa penyediaan anggaran pembayaran lembur kepada pegawai yang bekerja diluar jam kerja" **(I Baris 102)**	**102**	**IS/I/2/102** **Cara Baca:** Pak IsmaiBerkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 2 baris ke 1
I-A	" iya, selalu diadakan rapat evaluasi minimal satu kali dalam sebulan yaitu rapat staf disampaikan apa-apa progres yang harus diselesaikan setiap ada masalah maka dilakukan rapat staf untuk mendapatkan solusi" **(I-A Baris 107)**	**107**	**IS/I-A/2/107** **Cara baca :** Pak ismail mempertimbangkan keinginan pendengar terdapat pada lampiran 2 baris ke 107.
I	I: "penerpan fungsi pengawasan yang kami lakukan adalah setiap kegiatan di kantor BPKD Gowa telah dilaukan maka dibuatkan laporan pertanggungjawabanya dan setiap bulanya laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) yang ada di kantor BPKD Gowa muat di website humas BPKD Gowa sehingga smua bisamelihat laporan tersebut secara transparan. " **(I Baris 124)**	**124**	**IS/I/2/124** **Cara Baca:** Pak Ismail Berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 2 baris ke 124 .
I	" dimana pelaporan masih menggunakan aplikasi ekmis yag dari BPKP tapi untuk 2024 diwajibkan untuk menggunakan SIPD RI untuk proses penganggaranya dimana di aplikasi ekmis itu belum termasuk perencanaan belum termasuk didalamnya baru penatausahaan, penganggaran dan pelaporan di ekmis pengelolaan keuanganya." **(I Baris 181)**	**181**	**AH/I/3/181** **Cara baca :** Ibu andrian hasan Berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 3 baris ke 181 .

I-A	: “ iya disalurkan tepat waktu, karna setiap tahunya diusahan penyaluran dana dan pelaporan itu tepat waktu karna tidak mau ada pemotongan dll, jadi ada aturan mengenai jadwal pelaporan mengenai berapa dana yang disalurkan dan kapang disalurkan serta batas waktu penyalurannya itu dirangkum semua dalam aplikasi dalam bentuk DAU dan laporan dana alokasi khusus DAK dimana jadwal akhir pelaporan kontraknya setiap tahun 21 juli sebagian dari dana yang turun dan jadwal setiap anggaran berbeda-beda dimana khusus DAK itu ada namanya DAK Fisik dan non fisik yang mana dak fisik itu harus ada yang namanya kontrak yang di upload pelaporan-pelapran tahun sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi untuk dana bisa turun dan disalurkan, kalau dak non fisik itu tidak ada kontrak cuman di upload saja realisasi atau penggunaan tahun sebelumnya **(I-A Baris 186)**	**186**	**AH/I-A/3/186** **Cara baca :** Ibu andriani hasan mempertimbangkan keinginan pendengar terdapat pada lampiran 3 baris ke 186
I	“iya sudah, karna terkait dengan aplikasi ini masalah pengelolaan keuangan begitu telah selesai mengimput pendukung yang dibutuhkan terus membuat jurnal penyesuaiaian di akhir tahun maka laporan itu akan selesai, dan jikapun ada masalah maka akan terus dilakukan evaluasi dan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga proses pelaporan di kantor BPKD Gowa selesai tepat waktu”. **(I Baris 243)**	**243**	**AH/I/I/243** **Cara baca** Ibu andrian hasan Berkomunikasi dengan pendengar terdapat pada lampiran 3 baris ke 243

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian Dan Surat Balasan

(surat permohonan penelitian LP3M)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3055/05/C.4-VIII/XII/1445/2023 — 17 Jumadil Awal 1445
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 30 Nopember 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 137/05/A.2-II/XII/45/2023 tanggal 19 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURFADILLAH**
No. Stambuk : **10572 1120220**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jurusan : **Manajemen**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN DALAM EFEKTIF DI KANTOR DAERAH KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2023 s/d 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr.Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

12-23

(Surat Permohonan Penelitian PTSP GOWA)

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmptsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/1416/DPM-PTSP/PENELITIAN/XII/2023
Lampiran :
Perihal : ***Surat Keterangan Penelitian***

KepadaYth.
Kepala Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 31951/S.01/PTSP/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	:	**NURFADILLAH**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Bulukumba / 11 November 2002
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor Pokok	:	105721120220
Program Studi	:	Manajemen
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Dusun Bungaya Desa Kindang Kec Kindang Kab Bulukumba

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF DI KANTOR DAERAH KABUPATEN GOWA (STUDI KASUS PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA)"

Selama : 25 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 20 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,

H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:
1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

(Surat Balasan Dari Instansi BPKD Gowa)

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Masjid Raya No. 30 Tlp (0411) 865 098 Sungguminasa

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/04/BPKD

1. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nomor : 503/1416/DPM-PTSP/PENELITIAN/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Penelitian.

2. Yang bertandatangan dibawah ini :
   Nama : H. Abdul Karim Dania, SE, MM
   Nip : 19641231 199603 1 012
   Pangkat : Pembina Utama Muda
   Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa
   Dengan ini menerangkan bahwa :
   Nama : Nurfadillah
   Tempat, tgl lahir : Bulukumba, 11 November 2002
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Alamat : Dusun Bungaya Desa Kindang Kec.Kindang Kab.Bulukumba
   NIM : 105721120220
   Program Studi : Manajemen
   Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Telah mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Thesis/Disertasi yang berjudul ***"ANALISIS FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA"*** mulai pada tanggal 25 Desember 2023 s/d 15 Februari 2024.

4. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 26 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

H. ABD KARIM DANIA, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 196412311996031012

Tembusan, Yth :
1. *Bapak Bupati Gowa (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa di Sungguminasa;*
3. *Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;*
4. *Yang Bersangkutan;*
5. *Arsip,-.*

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 4 Dokumentasi Dan Foto

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	**PENDAPATAN**	**7.5.1.1**	**1.855.081.611.018,36**	**1.876.590.013.141,48**	**101,16**	**1.883.817.390.605,74**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.5.1.1.a**	**236.598.766.548,36**	**260.885.833.358,48**	**110,27**	**241.469.600.865,34**
3	Pajak Daerah	7.5.1.1.a.1)	117.579.635.430,00	133.952.261.485,50	113,92	115.543.741.226,00
4	Retribusi Daerah	7.5.1.1.a.2)	51.131.043.203,00	49.614.791.303,25	97,03	66.507.429.022,99
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.5.1.1.a.3)	5.020.000.000,00	4.069.728.564,00	81,07	4.342.158.893,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.a.4)	62.868.087.915,36	73.249.052.005,73	116,51	55.076.271.723,35
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**7.5.1.1.b**	**1.506.990.886.470,00**	**1.504.212.221.783,00**	**99,82**	**1.543.464.249.740,40**
8	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**7.5.1.1.b.1)**	**1.415.008.115.014,00**	**1.411.479.987.069,00**	**99,75**	**1.268.438.404.285,00**
9	Dana Perimbangan	7.5.1.1.b.1)a)	1.233.931.415.014,06	1.230.751.811.269,00	99,74	1.217.293.801.285,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.1.1.b.1)b)	33.743.810.000,00	33.743.810.000,00	100,00	51.144.603.000,00
11	Dana Desa	7.5.1.1.b.1)c)	147.332.862.000,00	146.984.365.800,00	99,76	0,00
12	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**7.5.1.1.b.2)**	**91.982.771.456,00**	**92.732.234.714,00**	**100,81**	**275.025.845.455,40**
13	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.b.2)a)	83.543.231.456,00	84.292.694.714,00	100,90	236.925.376.355,40
14	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.b.2)b)	8.439.540.000,00	8.439.540.000,00	100,00	38.100.469.100,00
15	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.5.1.1.c**	**111.491.958.000,00**	**111.491.958.000,00**	**100,00**	**98.883.540.000,00**
16	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.c.1)	24.057.068.000,00	24.057.068.000,00	100,00	3.000.000.000,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.c.2)	87.434.890.000,00	87.434.890.000,00	100,00	95.883.540.000,00
18	**BELANJA DAERAH**	**7.5.1.2**	**2.224.019.879.780,36**	**1.804.781.925.587,04**	**81,15**	**1.882.261.639.918,55**
19	**BELANJA OPERASI**	**7.5.1.2.a**	**1.349.734.950.739,28**	**1.232.902.988.769,96**	**91,34**	**1.245.717.873.659,00**
20	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	759.699.880.110,25	704.369.053.408,00	92,72	716.976.502.117,00
21	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	535.867.170.046,03	490.721.967.530,76	91,58	411.698.773.822,00
22	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	5.055.000.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.4)	45.922.190.565,00	34.761.103.331,20	75,70	97.217.987.620,00
24	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.a.5)	3.190.710.018,00	3.050.861.500,00	95,62	19.824.610.100,00
25	**BELANJA MODAL**	**7.5.1.2.b**	**641.948.083.595,08**	**340.526.505.116,08**	**53,05**	**370.451.454.170,66**
26	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	7.978.687.000,00	7.887.613.541,00	98,86	0,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	98.470.964.151,00	75.863.149.202,00	77,04	39.191.130.203,00
28	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	7.5.1.2.b.3)	175.239.378.984,00	149.842.842.330,73	85,51	106.905.330.955,82
29	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	352.462.558.460,08	99.172.813.160,35	28,14	209.235.275.663,84
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	7.796.495.000,00	7.760.086.882,00	99,53	14.880.402.848,00
31	Belanja Aset Lainnya	7.5.1.2.b.6)	0,00	0,00	0,00	239.114.500,00
32	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.5.1.2.c**	**1.450.000.000,00**	**1.421.422.832,00**	**98,03**	**35.458.048.000,00**
33	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.c	1.450.000.000,00	1.421.422.832,00	98,03	35.458.048.000,00
34	**BELANJA TRANSFER**	**7.5.1.3**	**230.886.845.446,00**	**229.931.011.869,00**	**99,59**	**230.634.264.088,89**
35	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.3.a	1.675.443.700,00	1.068.106.323,00	63,75	0,00
36	Bagi Hasil Pajak	7.5.1.3.b	0,00	0,00	0,00	637.506.543,00
37	Bagi Hasil Retribusi	7.5.1.3.c	0,00	0,00	0,00	430.599.528,00
38	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.3.d	229.211.401.746,00	228.862.905.546,00	99,85	0,00
39	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.3.e	0,00	0,00	0,00	228.009.276.995,00
40	Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.3.f	0,00	0,00	0,00	1.556.881.022,89
41	**SURPLUS / (DEFISIT)**		**(368.938.268.762,00)**	**71.808.087.554,44**	**(19,46)**	**1.555.750.687,19**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

AUDITED

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN	7.5.1.1	1.760.456.992.472,00	1.780.968.775.257,69	101,17	1.876.590.013.141,48
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.5.1.1.a	250.890.698.571,00	265.326.827.151,69	105,75	260.885.833.358,48
3	Pajak Daerah	7.5.1.1.a.1)	135.650.581.430,00	148.268.572.233,00	109,30	133.952.261.485,50
4	Retribusi Daerah	7.5.1.1.a.2)	69.790.772.397,00	68.570.249.968,00	98,25	49.614.791.303,25
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.51.1.a.3)	4.282.256.747,00	3.932.255.747,00	91,83	4.069.728.564,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.a.4)	41.167.087.997,00	44.555.749.203,69	108,23	73.249.052.005,73
7	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.1.b	1.496.976.493.901,00	1.503.052.148.106,00	100,41	1.504.212.221.783,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.1.b.1)	1.387.453.722.445,00	1.369.674.786.928,00	98,72	1.411.479.987.069,00
9	Dana Perimbangan	7.5.1.1.b.1)a)	1.247.757.851.445,00	1.230.272.383.324,00	98,60	1.230.751.811.269,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)	7.5.1.1.b.1)b)	0,00	0,00	0,00	33.743.810.000,00
11	Dana Desa	7.5.1.1.b.1)c)	139.695.871.000,00	139.402.403.604,00	99,80	146.984.365.800,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.b.2)	109.542.771.456,00	133.377.361.178,00	121,76	92.732.234.714,00
13	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.b.2)a)	87.193.231.456,00	111.175.477.722,00	127,50	84.292.694.714,00
14	Bantuan Keuangan	7.5.1.1.b.2)b)	22.349.540.000,00	22.201.883.456,00	99,34	8.439.540.000,00
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.5.1.1.c	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100,00	111.491.958.000,00
16	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.c.1)	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100,00	24.057.068.000,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.c.2)	0,00	0,00	0,00	87.434.890.000,00
18	BELANJA DAERAH	7.5.1.2	2.141.847.697.845,00	1.884.121.196.569,39	87,97	1.804.781.925.587,04
19	BELANJA OPERASI	7.5.1.2.a	1.346.030.112.108,74	1.225.185.156.196,99	91,02	1.232.902.985.769,96
20	Belanja Pegawai	7.5.1.2.a.1)	749.038.521.195,78	673.995.605.735,00	89,98	704.369.053.408,00
21	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.2.a.2)	499.449.547.731,96	464.980.693.504,00	93,10	490.721.967.530,76
22	Belanja Bunga	7.5.1.2.a.3)	9.983.759.500,00	5.304.022.159,00	53,13	0,00
23	Belanja Hibah	7.5.1.2.a.4)	66.572.891.458,00	60.148.527.795,99	90,35	34.761.103.331,20
24	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.2.a.5)	20.985.392.223,00	20.756.307.003,00	98,91	3.050.861.500,00
25	BELANJA MODAL	7.5.1.2.b	570.664.012.650,26	434.874.874.985,40	76,21	340.526.505.116,08
26	Belanja Modal Tanah	7.5.1.2.b.1)	3.008.347.500,00	2.062.755.080,00	68,57	7.887.613.541,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.2.b.2)	78.934.490.767,00	74.153.795.784,00	93,94	75.863.149.202,00
28	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	7.5.1.2.b.3)	68.905.129.591,00	59.814.239.827,00	86,81	149.842.842.330,73
29	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.2.b.4)	407.200.068.452,26	287.449.217.984,40	70,59	99.172.813.160,35
30	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.2.b.5)	12.615.976.390,00	11.394.866.310,00	90,32	7.760.086.882,00
31	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.5.1.2.c	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21	1.421.422.832,00
32	Belanja Tidak Terduga	7.5.1.2.c	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21	1.421.422.832,00
33	BELANJA TRANSFER	7.5.1.3	222.992.077.701,00	222.111.272.927,00	99,61	229.931.011.869,00
34	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.3.a	1.675.443.701,00	1.068.106.323,00	63,75	1.068.106.323,00
35	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.3.d	221.316.634.000,00	221.043.166.604,00	99,88	228.862.905.546,00
36	SURPLUS / (DEFISIT)		(381.390.705.373,00)	(103.152.421.311,70)	27,05	71.808.087.554,44
37	PEMBIAYAAN DAERAH	7.5.1.4				
38	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.4.a	449.161.514.568,00	436.766.961.475,47	97,24	148.953.157.506,03
39	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.4.a.1)	215.651.514.568,00	215.761.245.060,47	100,05	148.921.157.506,03
40	Penerimaan Pinjaman Daerah	7.5.1.4.a.2)	233.510.000.000,00	220.971.726.415,00	94,63	0,00
41	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.5.1.4.a.3)	0,00	33.990.000,00	0,00	0,00

(wawancara dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian kantor BPKD Gowa)

(wawancara dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian kantor BPKD Gowa)

(wawancara dengan staff sub bagian perencanaan dan pelaporan kantor BPKD Gowa)

(wawancara dengan staff sub bagian akuntansi keuangan di kantor BPKD Gowa)

Lampiran 5 Hasil Validasi Data

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8|e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA	Nurfadillah
NIM	105721120220
PROGRAM STUDI	Manajemen
JUDUL SKRIPSI	Analisis Fungsi manajemen keuangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif pada kantor badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Gowa
NAMA PEMBIMBING 1	Asri jaya,SE,.M.M
NAMA PEMBIMBING 2	Nurlina, SE., MM
NAMA VALIDATOR	Alamsjah, S.T., S.E., M.M

No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	✓
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya		Sudah Sesuai	✓
3	Hasil Uji Keabsahan Data		Sudah Sesuai	✓
4	Hasil deskripsi penelitian		Sudah Sesuai	✓
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)		Sudah Sesuai	✓
6	Hasil analisis		Sudah Sesuai	✓

**Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui*

Lampiran 6 Hasil Validasi Abstrak

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA
Jl. Sultan Alauddin 259 Makassar, Gedung Iqra lt. 8 | e-mail: pvd.feb@unismuh.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA	Nurfadillah
NIM	105721120220
PROGRAM STUDI	Manajemen
JUDUL SKRIPSI	Analisis Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Yang Efektif Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
NAMA PEMBIMBING 1	Asri jaya, SE,.M.M
NAMA PEMBIMBING 2	Nurlina, SE,.M.M
NAMA VALIDATOR	Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I

No	Dokumen	Tanggal Revisi/Acc	Uraian Perbaikan/saran	Paraf*
1	Abstrak	23/03/2024	1. Gunakan kalimat Main Supervisor (nama pembimbing I) dan Co-Supervisor (nama pembimbing II) 2. Gunakan spasi 3 ketukan untuk awal paragraf pada hasil abstrak 3. Tambahkan kata skripsi sesudah judul penelitian	

Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

BAB I Nurfadillah
105721120220
by TutupTahap

Submission date: 25-Mar-2024 07:55AM (UTC+0700)
Submission ID: 2329953968
File name: BAB_I_1_3.docx (16.86K)
Word count: 738
Character count: 4528

AB I Nurfadillah 105721120220

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	4%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	4%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%

LULUS

turnitin

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Nurfadillah 105721120220

by TutupTahap

Submission date: 25-Mar-2024 07:56AM (UTC+0700)
Submission ID: 2329955487
File name: BAB_II_1_5.docx (58.38K)
Word count: 2260
Character count: 15337

AB II Nurfadillah 105721120220

ORIGINALITY REPORT

19%	21%	2%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	3%
2	journal.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	2%
4	journal.stiem.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	2%
7	www.scilit.net Internet Source	2%
8	eprint.stieww.ac.id Internet Source	2%
9	123dok.com Internet Source	2%

LULUS
turnitin

BAB III Nurfadillah 105721120220

by TutupTahap

Submission date: 25-Mar-2024 07:57AM (UTC+0700)
Submission ID: 2329957056
File name: BAB_III_1_2.docx (41.21K)
Word count: 1223
Character count: 7097

AB III Nurfadillah 105721120220

RIGINALITY REPORT

10%	9%	5%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Dwi Nuning Anggraeny, Ririn Puspita Tutiasri, Zainal Abidin Achmad, Saifuddin Zuhri4. "Persepsi Khalayak pada Postingan Akun Instagram Publik Figure @Krisdayantilemos Terkait Penghapusan Syarat PCR dan Swab Antigen Pelaku Perjalanan Domestik", Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2023 Publication	2%
2	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	2%
3	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
4	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	123dok.com Internet Source	2%

LULUS
turnitin

BAB IV Nurfadillah 105721120220

by TutupTahap

Submission date: 25-Mar-2024 07:58AM (UTC+0700)
Submission ID: 2329958735
File name: BAB_IV_2_1.docx (132.49K)
Word count: 6335
Character count: 43223

BAB IV Nurfadillah 105721120220

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	5%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.poltektegal.ac.id Internet Source	3%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	jurnaluniv45sby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

LULUS
turnitin

BAB V Nurfadillah 105721120220

by TutupTahap

Submission date: 25-Mar-2024 07:59AM (UTC+0700)
Submission ID: 2329960515
File name: BAB_V_-_2024-03-25T085206.097.docx (22.38K)
Word count: 327
Character count: 2199

BAB V Nurfadillah 105721120220

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
LULUS
turnitin

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurfadillah
Nim : 105721120220
Program Studi : Manajemen

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Maret 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nursinuh, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BIOGRAFI PENULIS

NURFADILLAH panggilan Adilah lahir Dibulukumba Pada tanggal 11 November 2002 Dari pasangan suami istri bapak Sappewali Dan Ibu Dahliah. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 55 Cibollo Lulus pada tahun 2014, MTS NO.1 Kindang Lulus pada tahun 2017, MA Guppi Kindang Lulus pada tahun 2020, mengikuti program S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai Dengan Sekarang, Sampai Dengan Peneliti Menulis Skripsi Ini Masih Terdaftar Sebagai Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar, nurfadillablk10@gmail.com .